

**ANALISIS PENGARUH E-GOVERNMENT DAN *PUBLIC INTEGRITY*
TERHADAP PERSEPSI KORUPSI DENGAN *CONTROL OF
CORRUPTION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Tesis)

Oleh

**ADILAH SABRINA MUTI'AH
NPM 2221031048**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN *PUBLIC INTEGRITY*
TERHADAP PERSEPSI KORUPSI DENGAN *CONTROL OF
CORRUPTION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Oleh

ADILAH SABRINA MUTI'AH

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN *PUBLIC INTEGRITY* TERHADAP PERSEPSI KORUPSI DENGAN *CONTROL OF* *CORRUPTION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Oleh

Adilah Sabrina Muti'ah

Perkembangan teknologi ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sehingga mampu mencegah terjadinya korupsi yang masih terus menjadi perhatian dunia. Untuk dapat memberantas korupsi memerlukan integritas dari berbagai faktor seperti, sosial, ekonomi, teknologi, serta hukum. Namun, pada praktiknya, teknologi yang semakin maju dan publik yang semakin terintegritas tidak didukung oleh perbaikan persepsi bahwa negara bersih dari korupsi. Sehingga menimbulkan pertanyaan efektifitas kedua indikator tersebut dalam mempengaruhi korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *E-Government* dan *Public Integrity* dalam memperbaiki persepsi korupsi melalui *Control of Corruption*. Melalui pengambilan data sekunder dari *website* masing-masing indikator dari 39 negara yang termasuk dalam negara G20. Proses analisis data dilakukan dengan metode analisis data panel menggunakan Eviews dan analisis sobel untuk pengujian intervening. Hasil penelitian menemukan bahwa *E-Government* dan *Public Integrity* dapat menjadi alat kontrol korupsi yang efektif sehingga mampu memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi, walau *E-Government* tidak dapat mempengaruhi secara langsung. Penelitian ini berkontribusi dalam penetapan kebijakan anti-korupsi bagi negara G20 untuk mendukung program ACWG (*Anti Corruption Working Group*). Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel yang mengeliminasi negara dengan pengaruh ekonomi yang besar terhadap dunia seperti China, Jepang, dan Arab Saudi. Sehingga dengan menggunakan indikator lain pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan negara-negara tersebut ke dalam sampel penelitian.

Keywords: E-Government, Integritas Publik, Pengendalian Korupsi, Persepsi Korupsi

ABSTRACT**ANALISIS PENGARUH *E-GOVERNMENT* DAN *PUBLIC INTEGRITY*
TERHADAP PERSEPSI KORUPSI DENGAN *CONTROL OF
CORRUPTION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING****By****Adilah Sabrina Muti'ah**

Technological developments are aimed at increasing transparency, accountability and public participation so as to prevent corruption, which continues to be a global concern. To be able to eradicate corruption requires integrity from various factors such as social, economic, technological and legal. However, in practice, increasingly advanced technology and an increasingly integrated public are not supported by an improvement in the perception that the country is free from corruption. This raises questions about the effectiveness of these two indicators in influencing corruption. This research aims to analyze the influence of E-Government and Public Integrity in improving perceptions of corruption through Control of Corruption. By collecting secondary data from the website of each indicator from 39 countries included in the G20 countries. The data analysis process was carried out using the panel data analysis method using Eviews and Sobel analysis for intervening testing. The research results found that E-Government and Public Integrity can be effective corruption control tools so that they can improve the perception that the country is free from corruption, even though E-Government cannot influence it directly. This research contributes to establishing anti-corruption policies for G20 countries to support the ACWG (Anti Corruption Working Group) program. The limitation of this research lies in the sample which eliminates countries with large economic influence on the world such as China, Japan and Saudi Arabia. So by using other indicators in future research it is hoped that these countries can be included in the research sample..

Keywords: E-Government, Public Integrity, Control of Corruption, Corruption Perception

Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH E-GOVERNMENT DAN PUBLIC INTEGRITY TERHADAP PERSEPSI KORUPSI DENGAN CONTROL OF CORRUPTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Nama Mahasiswa : Adilah Sabrina Muti'ah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031048

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

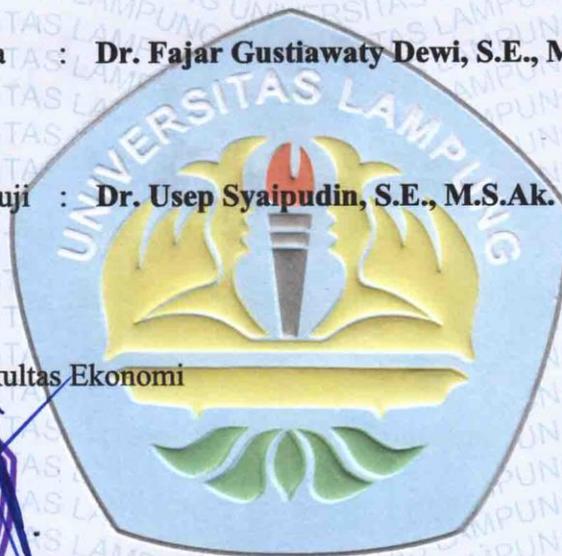
Pembimbing II

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni,
S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001**

**Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19751026 200212 2002**

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001**

MENGESAHKAN**1. Tim Pengujji****Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayunu, S.E., M.Si., Ak.****Sekretaris : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.****Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.****Anggota Pengujji : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.****2. Dekan Fakultas Ekonomi****Prof. Dr. Nazrobi, S.E., M.Si.**
NIP 19660621 199003 1003**3. Direktur Pascasarjana****Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**
NIP 19640326 198902 1001**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 02 Februari 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adilah Sabrina Muti'ah

NPM : 2221031048

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh *E-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai Variabel Intervening” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat sebagian tulisan atau keseluruhan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 6 Maret 2024



Adilah Sabrina Muti'ah

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Adilah Sabrina Muti'ah, dilahirkan di Bogor pada tanggal 08 Mei 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si. dan Ir. Mardiani, M.Si. Penulis mengawali pendidikan di TK Qurrota A'yun, SD IT Permata Bunda, SMP IT Daarul Quran Mulia, dan SMA Perguruan Al Kautsar dan lulus pada tahun 2018. Penulis lulus dari Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung di tahun 2022 dengan predikat *cumlaude* dan mendapatkan penghargaan sebagai Lulusan Terbaik 2 FEB. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa Pascasarjana Unila periode 2022 untuk mengejar karir sebagai akuntan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Samsul Rizal dan Ibunda Mardiani.

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan akhirat, Aamiin.

Saudara, Teman, dan Rekan Kerjaku.

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen bahagia yang kita lalui bersama.

Seluruh Dosen dan Staff FEB Unila.

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan.

Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin.

Almaterku. Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pengaruh *E-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai Variabel Intervening”.

Penyusunan tesis guna melengkapai dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.

3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan
5. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
6. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Abiku tercinta Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si., Umiku tercinta Ir. Mardiani, M.Si., Kakak pertamaku dr. Arini Hidayati, S.Ked. dan Kakak iparku Rahmat Hidayat, S.Si., M.Si., Kakak keduaku Atiya Kamila, S.Pd, Adikku Adzkia Afidah, dan Adik bungsku Aliyya Ulfa yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

10. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.
11. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai selama masa perkuliahanku, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi semangat, serta do'a.
12. Rekan-rekan kerjaku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, yang telah menyemangati dan mendoakan kelancaran perkuliahanku.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan daloam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandarlampung, 6 Maret 2024

Adilah Sabrina Muti'ah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	2
RIWAYAT HIDUP	3
PERSEMBAHAN.....	4
SANWACANA	6
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Masalah Penelitian	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	15
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.2 <i>Fraud</i>	16
2.3 Persepsi Korupsi (<i>Corruptions Perception</i>)	18
2.4 <i>E-Government</i>	20
2.5 <i>Public Integrity</i>	22
2.6 <i>Control of Corruption</i>	28
2.7 Penelitian Terdahulu.....	31
2.8 Kerangka Pemikiran	34
.....	34
2.9 Pengembangan Hipotesis	34
2.9.1 Pengaruh <i>e-Government</i> terhadap <i>Control of Corruption</i>	34
2.9.2 Pengaruh <i>Public Integrity</i> terhadap <i>Control of Corruption</i>	35
2.9.3 Pengaruh <i>Control of Corruption</i> terhadap Persepsi Korupsi	37
2.9.4 Pengaruh <i>e-Government</i> terhadap Persepsi Korupsi.....	38
2.9.5 Pengaruh <i>Public Integrity</i> terhadap Persepsi Korupsi	39
2.9.6 <i>Control of Corruption</i> Berperan Sebagai Intervening dalam Pengaruh <i>e-Government</i> terhadap Persepsi Korupsi	41
2.9.7 <i>Control of Corruption</i> Berperan Sebagai Intervening dalam Pengaruh <i>Public Integrity</i> terhadap Persepsi Korupsi	42
BAB III Metodologi Penelitian	44
3.1 Jenis dan Sumber Data	44
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45

3.4	Metode Analisis.....	47
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel.....	48
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.4.4	Uji Hipotesis.....	52
BAB IV	Hasil Penelitian.....	56
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.2	Pemilihan Model Estimasi.....	74
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	76
4.4	Analisis Regresi.....	78
4.5	Uji Hipotesis.....	80
4.6	Uji Determinasi.....	86
4.7	Pembahasan.....	86
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	106
5.1.	Kesimpulan.....	106
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	107
5.3.	Saran.....	107
5.4.	Implikasi.....	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Penilaian CPI	19
Tabel 2. Metodologi Pengukuran <i>Administrative Transparency</i>	24
Tabel 3. Metodologi <i>Budget Transparency Index</i>	25
Tabel 4. Metodologi <i>Online Services Index</i>	26
Tabel 5. Metodologi <i>E-Citizenship</i>	27
Tabel 6. Metodologi <i>Freedom of the Press Index</i>	27
Tabel 7. Metodologi <i>Judicial Independence Index</i>	28
Tabel 8. Metodologi Pengukuran <i>Control of Corruption</i>	30
Tabel 9. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 10. Hipotesis Penelitian	43
Tabel 11. Sumber Data Penelitian.....	44
Tabel 12. Sampel Penelitian.....	45
Tabel 13. Range Level <i>E-Government</i>	46
Tabel 14. Variabel Penelitian	47
Tabel 15. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel. 16 Hasil Uji <i>Chow</i> Model 1	74
Tabel. 17 Hasil Uji <i>Hausman</i> Model 1	75
Tabel.18 Hasil Uji <i>Chow</i> Model 2	75
Tabel 19. Hasil Uji <i>Hausman</i> Model 2	76
Tabel 20. Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1	76
Tabel 21. Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2	77
Tabel 22. Hasil Uji Multikolinearitas Model 1	77
Tabel 23. Hasil Uji Multikolinearitas Model 2	77
Tabel 24. Hasil Uji t Model 1.....	80
Tabel 25. Hasil Uji t Model 2.....	81
Tabel 26. Nilai Koefisien dan <i>Standard Error</i> dari Uji t.....	81
Tabel 27. Hasil Pengujian Variabel Intervening	85
Tabel 28. Hasil Uji Hipotesis	85
Tabel 29. Hasil Uji Determinasi Model 1 dan Model 2.....	86
Tabel 30. Tabulasi Data Statistik Deskriptif	116
Tabel 31. Tabulasi Data Uji Hipotesis	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Rule of Law Score</i> Negara G20 Tahun 2019 - 2021	8
Gambar 2. <i>E-Government Score</i> Negara G20 Tahun 2018 – 2022.....	9
Gambar 3. <i>Corruption Perceptions Index Score</i> Negara G20 Tahun 2018 – 2022	10
Gambar 4. <i>Index of Public Integrity Score</i> Negara ASEAN 2018 – 2022.....	11
Gambar 5. Kerangka Penelitian	34
Gambar 6. <i>Interactive Mediation Test Online</i> oleh Daniel Soper.....	53
Gambar 7. Prosedur Analisis Intervening	54
Gambar 8. Statistik Deskriptif Persepsi Korupsi	57
Gambar 9. Statistik Deskriptif <i>Control of Corruption</i>	59
Gambar 10. Statistik Deskriptif <i>E-Government</i>	60
Gambar 11. Statistik Deskriptif <i>Human Capital (E-Government)</i>	61
Gambar 12. Deskriptif Statistik <i>Telecommunication Infrastructure (E- Government)</i>	63
Gambar 13. Statistik Deskriptif <i>Online Service (E-Government)</i>	64
Gambar 14. Statistik Deskriptif <i>Public Integrity</i>	65
Gambar 15. Deskriptif Statistik <i>Administrative Transparency (Index of Public Integrity)</i>	66
Gambar 16. Deskriptif Statistik <i>Budget Transparency (Index of Public Integrity)</i>	68
Gambar 17. Statistik Deskriptif <i>Online Service (Index of Public Integrity)</i>	69
Gambar 18. Statistik Deskriptif <i>E-Citizenship (Index of Public Integrity)</i>	71
Gambar 19. Statistik Deskriptif <i>Freedom of the Press (Index of Public Integrity)</i>	72
Gambar 20. Statistik Deskriptif <i>Judicial Independence (Index of Public Integrity)</i>	74
Gambar 21. Hasil Uji Sobel <i>E-Government</i>	83
Gambar 22. Hasil Uji Sobel <i>Public Integrity</i>	83
Gambar 23. Prosedur Analisis Intervening	84
Gambar 24. Hasil Uji Hipotesis	85

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya penggunaan teknologi pada berbagai sistem yang diterapkan di berbagai sektor menciptakan peluang baru dalam memberikan layanan yang baik di sektor publik. Pada sektor publik, penerapan sistem teknologi disebut sebagai *e-Government* sebagai *digital revolution* yang memiliki tujuan dalam menyediakan layanan informasi pemerintah secara efisien kepada masyarakat serta bisnis. Tujuan dalam diterapkannya *e-Government* adalah untuk meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, serta transparansi atas layanan yang diberikan (Chen & Aklikokou, 2019).

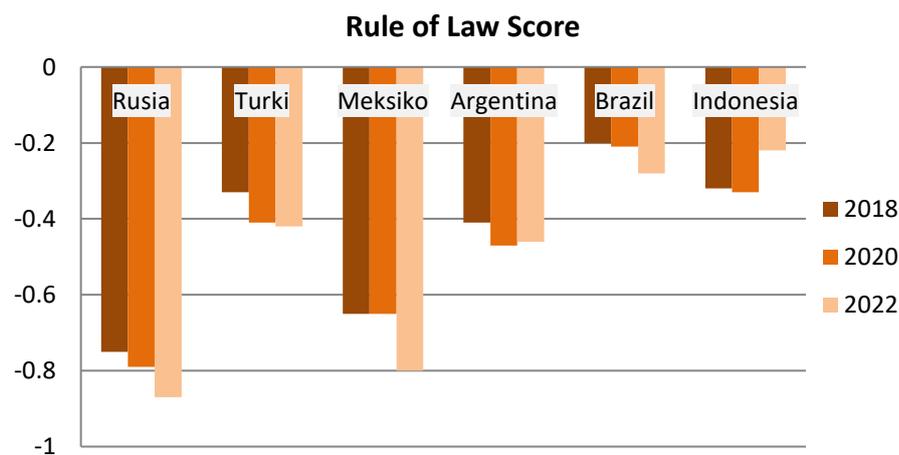
Dalam hal kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi, tentu ditujukan untuk dapat mengurangi kesenjangan informasi yang terjadi di suatu negara. Asimetri informasi terjadi diantara pihak yang berperan sebagai *agent*, dalam hal ini adalah pemerintah, yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi dan administrasi negara sehingga memiliki kesempatan dalam mengedepankan kepentingan individu dengan mengesampingkan kepentingan pihak lain yang berperan sebagai *principal*, dalam hal ini adalah masyarakat (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi bisa menjadi peluang dalam melakukan tindakan kecurangan atau *Fraud* dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. *Fraud* sendiri diklasifikan dalam tiga jenis: 1) penyalahgunaan atau pencurian aset, 2) rekayasa laporan keuangan, dan 3) korupsi (AFCE, 2016).

E-Government telah diterapkan pada berbagai belahan dunia sejak tahun 2000-an. Namun, setelah penerapan dan pengembangan *e-Government*, hingga kini korupsi masih menjadi masalah yang tidak ada akhirnya dan selalu menjadi fokus

perhatian berbagai belahan dunia (Lustrilanang et al., 2023). Urgensinya permasalahan korupsi mendorong negara-negara membentuk persatuan, salah satunya *Anti-Corruption Working Group* (ACWG) pada tahun 2010 yang terhimpun dari negara-negara G20. Dibentuknya forum tersebut sebagai komitmen G20 dalam mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi dalam instrumen internasional maupun nasional dengan meningkatkan standar transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi dalam melawan korupsi (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Dalam pertemuan ACWG G20 di Indonesia tahun 2022 lalu, menyebutkan bahwa bentuk dan manifestasi korupsi terus berkembang dan menimbulkan kerentanan baru terlebih dalam masa krisis ekonomi seperti saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat pada negara-negara G20 dan peningkatan keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil dalam memastikan akuntabilitas dan pemaksimalan negara dalam mengatasi masalah korupsi (G20 Indonesia, 2022).

G20 atau *Group of Twenty* merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi internasional dengan beranggotakan 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa yang memiliki perekonomian yang besar. Pembentukan forum ini dimulai sejak tahun 1999 sebagai reformasi dari kegagalan G7 dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi global pada saat itu. Berdasarkan hasil pandangan masa itu, negara-negara dengan ekonomi menengah dan berkembang perlu untuk diikutsertakan. G20 dinilai strategis karena mewakili setidaknya 65% populasi dunia, 85% ekonomi dunia, dan 79% perdagangan global. Pada tahun 2010, G20 membentuk ACWG yang bekerjasama dengan B20, C20, OECD, UNODC, IMF, dan FATF. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai tujuan G20 dalam memperbaiki permasalahan dan sebagai negara acuan dalam ekonomi global, G20 perlu untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan anti-korupsi pada sektor publik, swasta, dan kerja sama internasional. Pada sektor publik, ACWG G20 mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas salah satunya melalui pengembangan eksplorasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas data pemerintah sebagaimana sejalan dengan tujuan dalam pengembangan *e-Government* (G20 Indonesia, 2022).

Namun, meskipun telah banyak kebijakan dalam memberantas korupsi yang diusulkan oleh ACWG G20 sejak tahun 2010, pada hasilnya masih banyak dan berkembangnya tindak korupsi yang terjadi di berbagai negara. Terlebih lagi, capaian indeks persepsi korupsi dari negara-negara anggota G20 yang masih menjadi perhatian penting untuk diselesaikan oleh G20. Berdasarkan catatan tingkat persepsi korupsi dalam *Corruptions Perception Index (CPI)* menunjukkan bahwa setidaknya 58% negara dalam G20 masih memiliki nilai CPI dibawah 50/100 dengan rata-rata skor CPI pada G20 adalah 54/100 yang menunjukkan masih perlunya komitmen implementasi antikorupsi di negara-negara G20 (G20 Indonesia, 2022). Sebagaimana hasil survey nasional terkait permasalahan negara yang paling mendesak untuk diselesaikan, di Indonesia salah satunya, menunjukkan bahwa korupsi menduduki peringkat kedua sebesar 15,2% setelah penciptaan lapangan kerja sebesar 37,3% (Kementerian Sekretariat Negara, 2023).



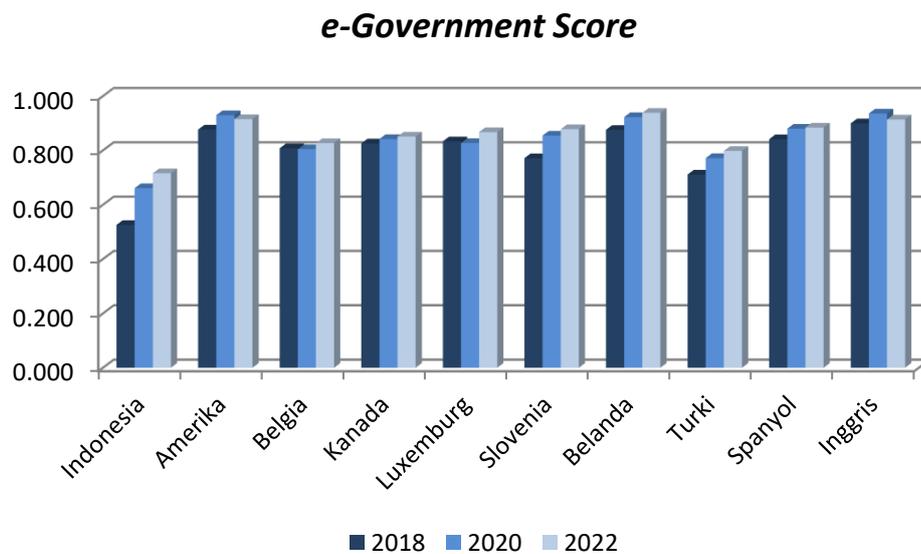
Sumber: World Bank, 2023

Gambar 1. Rule of Law Score Negara G20 Tahun 2019 - 2021

Selain itu, *Worldbank* mengatakan bahwa tingkat kepercayaan, kemungkinan terjadinya tindak kriminal, dan kepatuhan agen publik terhadap regulasi, kontrak, dan hak milik (*Rule of Law*) di beberapa negara dalam G20 memperlihatkan nilai yang masih dibawah rata-rata selama tiga tahun berturut-turut (World Bank, 1996). Artinya, selama tahun 2019 – 2021 beberapa negara dalam G20 masih memerlukan perhatian untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

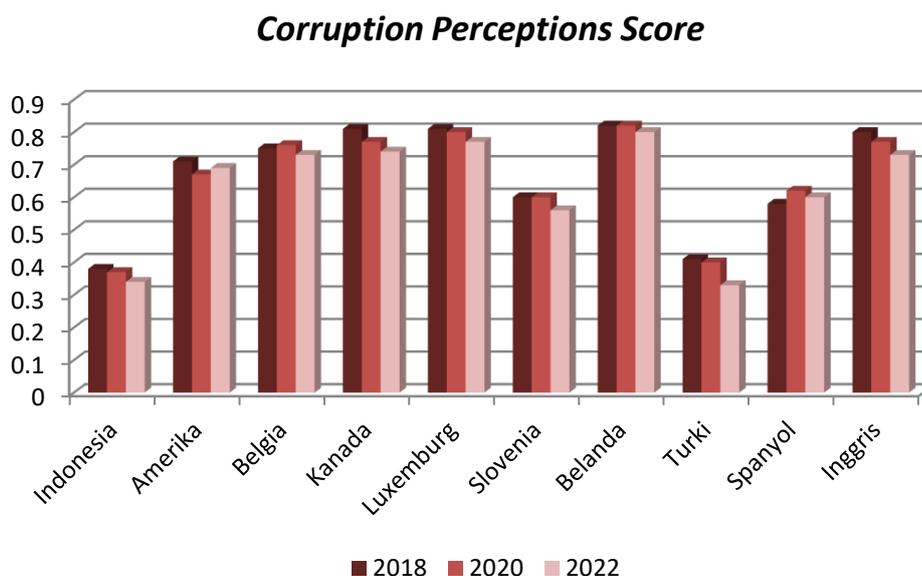
terhadap agen publik, kepatuhan terhadap regulasi-regulasi dan kontrak yang berlaku, serta menekan indikasi tindak kriminal maupun korupsi yang dapat terjadi. Terlebih lagi, selama tiga tahun tersebut mengalami penurunan nilai *Rule of Law* yang menjadi keprihatinan tersendiri.

Berdasarkan data terbaru menunjukkan setidaknya terdapat 21 hakim yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia (ICW, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya penegakan dan kepatuhan agen publik terhadap regulasi yang berlaku dan lemahnya independensi peradilan sehingga menciptakan besarnya kesempatan di beberapa negara dalam G20 untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat berupa korupsi (World Bank, 1996). Oleh sebab itu, perlu bagi negara G20 untuk memperkuat landasan regulasi yang dapat mengontrol korupsi dan mencegah terjadinya tindak korupsi agar memperbaiki persepsi bahwa negara telah terbebas dan bersih dari korupsi (persepsi korupsi).



Sumber: UNDESA, 2022

Gambar 2. *E-Government Score* Negara G20 Tahun 2018 – 2022



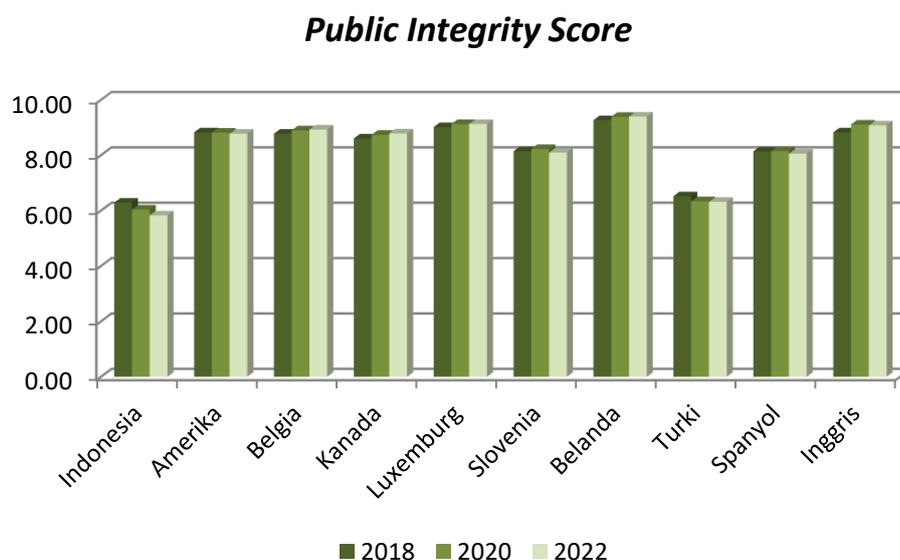
Sumber: Transparency International, 2022

Gambar 3. *Corruption Perceptions Index Score* Negara G20 Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan gambar 2 dan 3 diatas, dapat dilihat bahwa beberapa negara G20, baik merupakan negara berkembang maupun negara maju, yang termasuk dalam survey *e-Government* dan *Corruption Perception Index* (CPI) mengalami peningkatan level *e-Government* yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai persepsi bahwa negara bersih dari korupsi (Transparency International, 2022; UNDESA, 2022). Seperti Indonesia dalam *e-Government Development Index* mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,761 dengan ranking 77 dari 193 negara lainnya (UNDESA, 2022). Sedangkan pada nilai CPI menunjukkan penurunan penilaian persepsi bahwa negara bersih dari korupsi (Transparency International, 2022). Hal ini merupakan prestasi membanggakan bagi Indonesia, namun pada sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas penerapan *e-Government* yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tidak memberikan dampak terhadap penghindaran praktik korupsi. Di Indonesia sendiri terjadi penurunan nilai *Corruption Perceptions Index* (CPI) hingga 4 poin dari 38/100 menjadi 34/100 pada tahun 2022 lalu. Dengan rendahnya angka indeks korupsi tersebut, Indonesia dinilai memiliki kontrol terhadap korupsi yang

lemah sehingga menciptakan persepsi bahwa Indonesia tidak lebih bersih dari korupsi dibandingkan dengan periode sebelumnya (Lustrilanang et al., 2023).

Disamping itu, dalam rangka menekan tingkat korupsi dengan menyeimbangkan peluang yang dimiliki politisi maupun aparatur negara untuk melakukan tindak korupsi dengan kendala yang muncul sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat, media, maupun swasta, Pippidi & Dadašov (2016) dalam ERCAS & CIPE (2017) merumuskan indeks yang menilai integritas publik suatu negara dengan menggunakan indikator-indikator yang dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi berdasarkan hasil penelitian mereka. Sehingga dengan fokus pada indeks ini, negara diharapkan dapat menekan tingkat korupsi melalui indikator *Administrative Transparency, Online Services, Budget Transparency, Judicial Independence, e-Citizenship, dan Freedom of the Press* (ERCAS & CIPE, 2016).



Sumber: ERCAS & CIPE, 2022

Gambar 4. Index of Public Integrity Score Negara ASEAN 2018 – 2022

Berdasarkan perbandingan Gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa peningkatan indeks *Public Integrity* tidak selalu diikuti oleh peningkatan nilai persepsi bahwa negara bersih dari korupsi, baik pada negara berkembang maupun negara maju dalam G20 (ERCAS & CIPE, 2022; Transparency International, 2022). Hal ini

menimbulkan pertanyaan apakah integritas publik yang lebih baik tidak dapat menekan tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara, khususnya negara G20. Terlebih lagi, indeks *Public Integrity* merupakan gabungan dari indikator-indikator yang dinilai memiliki pengaruh yang signifikan atas kontrol korupsi ternyata tidak menunjukkan tercapainya tujuan tersebut (Pippidi & Dadašov, 2016).

Menurut World Bank (2023), *Control of Corruption* digunakan sebagai indikator dalam mengukur efektifitas tata kelola pemerintah dalam mengontrol dan mereduksi tingkat korupsi yang terjadi dengan menilai besarnya kekuasaan publik yang digunakan untuk kepentingan privat serta tindak korupsi kecil maupun besar. Tingginya nilai *Control of Corruption* mengindikasikan efektifnya kebijakan serta tata kelola suatu negara dalam mereduksi tingkat korupsi, begitu pula sebaliknya. Penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi dalam menilai pengaruh *e-Government* terhadap korupsi. Dimana beberapa penelitian mengatakan bahwa *e-Government* dapat menjadi alat yang efektif dalam menurunkan tingkat korupsi (Castro & Lopes, 2022; Chen & Aklikokou, 2019; Silal et al., 2023). Namun, di penelitian lain mengatakan bahwa *e-Government* tidak akan mempengaruhi korupsi jika penerapan *e-Government* tidak mampu mempengaruhi penegakan hukum negara yang dapat mengontrol korupsi (Alsaad, 2021; Musa et al., 2012). Berdasarkan fenomena yang terjadi memberikan pertanyaan apakah *e-Government* dan *Public Integrity* dapat menjadi alat kontrol korupsi yang mampu mencegah dan memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *e-Government* memberikan pengaruh signifikan terhadap pengendalian korupsi dan dapat meredam persepsi korupsi suatu negara (Chen & Aklikokou, 2019; Castro et al., 2022; dan Silal et al., 2023). Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah akan mempengaruhi kontrol korupsi dan kualitas tata kelola suatu negara dimana dalam *Worldwide Governance* juga dikatakan bahwa kontrol korupsi merupakan salah satu indikator dalam tata kelola negara (Zhang, 2016; Montes & Luna, 2020; dan Bisogno & Cuadrado-ballesteros, 2021). Lebih lanjut, *e-Government* dan *Public Integrity* yang menunjukkan transparansi dan

akuntabilitas pemerintah, dapat meningkatkan *Control of Corruption* dengan korelasi sebesar 88% dan mengurangi tingkat korupsi dengan peningkatan persepsi korupsi suatu negara dengan korelasi mencapai 89% (Cimpoeru & Cimpoeru, 2015; Yuliyana et al., 2016; dan Brusca et al., 2017; A. M. Pippidi & Dadašov (2016). Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa untuk dapat memperbaiki persepsi bahwa negara memiliki tingkat korupsi yang rendah dapat memperbaiki tata kelola negara yang baik salah satunya melalui kontrol korupsi yang dapat ditingkatkan dengan memperbaiki *e-Government* dan *Public Integrity*.

Namun, berlawanan dengan hasil penelitian tersebut, berdasarkan fenomena yang terjadi, mengindikasikan bahwa kenaikan nilai *e-Government* dan *Public Integrity* tidak selalu dapat menekan tingkat korupsi melainkan menurunkan tingkat persepsi pertahanan negara terhadap korupsi sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara G20 lainnya (United Nations, 2003). Selain itu, Oktavia et al., (2022) mengatakan bahwa kontrol korupsi suatu negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi suatu negara. Hal ini menjadi alasan lain dilakukannya penelitian ini. Perbedaan hasil antara penelitian-penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi menghasilkan pertanyaan mengenai ketepatan pengaruh *e-Government* maupun *Public Integrity* dalam mengurangi tingkat korupsi suatu negara apakah perlu melalui kontrol atas korupsi sebagai salah satu indikator tata kelola yang dimiliki negara.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik terkait, maka judul yang dapat disusun dari penelitian ini adalah “**Analisis Pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai Variabel Intervening**”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang fenomena dan penelitian terdahulu yang sejalan diatas, pengembangan *e-Government* di suatu negara dengan tujuan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi akan mempengaruhi tingkat korupsi negara tersebut. Lebih lanjut, indikator pengukuran pilihan dalam *Index of Public*

Integrity yang berasal dari pengukuran-pengukuran yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap korupsi diharapkan mampu menekan tingkat korupsi yang terjadi di negara G20 dan membantu memenuhi tujuan dari ACWG G20 dalam implementasi antikorupsi.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan mengkaji tingkat pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada negara G20.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap *Control of Corruption* di negara G20?
2. Bagaimana pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai variabel intervening di negara G20?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji besarnya pengaruh penerapan *e-Government* terhadap tingkat korupsi yang terjadi di negara G20. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap *Control of Corruption* di negara G20.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai variabel intervening di negara G20.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi acuan dalam menganalisis pengaruh penerapan *e-Government* terhadap *Control of Corruption*, pengaruh *Control of Corruption* terhadap *Corruptions Perception*, maupun pengaruh *e-Government* terhadap tingkat korupsi di negara G20.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hubungan *e-Government*, *Public Integrity*, *Control of Corruption* serta *Corruptions Perception* yang terjadi di negara G20. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh lembaga pemerintah, lembaga internasional, maupun lembaga publik lainnya dalam merumuskan regulasi dan mengelola pemerintahan suatu negara guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengurangi dan mencegah tindak korupsi.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga internasional, maupun lembaga publik lainnya mengenai *e-Government*, *Public Integrity*, *Control of Corruption*, dan tingkat korupsi. Terlebih bagi forum ACWG dalam G20 yang memberikan komitmen dalam implementasi kebijakan-kebijakan antikorupsi.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Bergman & Lane (1990) mengatakan bahwa teori keagenan tidak hanya terjadi dalam organisasi korporasi, melainkan hubungan yang terjadi pada sektor publik dalam negara demokrasi modern juga dapat dijelaskan berdasarkan teori agensi. Hal tersebut ditunjukkan oleh pejabat publik yang berperan sebagai “*agent*” yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta bisnis dengan tujuan optimalisasi dalam memakmurkan rakyat, dengan pihak “*principal*” yang dapat terdiri dari pemerintah itu sendiri yang mewakili masyarakat, dan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, asimetri informasi terjadi dimana pejabat publik sebagai agen memiliki informasi lebih mengenai administrasi publik sehingga dapat menciptakan anggapan bahwa negara dapat menjadi sumber pendapatan yang akan meningkatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain, kekuasaan diskresioner dan tanpa akuntabilitas yang cukup untuk keputusan dan hasil (Klitgaard, 1998). Oleh sebab itu, pemerintah sebagai “*agent*” atau pemegang amanah harus memberikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan pertanggungjawaban segala aktivitas dan keputusan kepada masyarakat sebagai “*principal*” atau penyedia sumber daya (Mardiasmo, 2002).

Lebih lanjut, Eisenhardt (1989) mengatakan bahwa dalam teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yang terdiri dari: 1) *Self Interest*. Dimana manusia pada umumnya akan mementingkan diri sendiri; 2) *Bounded Reality*. Dimana manusia pada umumnya memiliki daya pikir mengenai persepsi masa depan yang terbatas; dan 3) *Risk Averse*. Dimana manusia pada umumnya

selalu menghindari risiko. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pejabat publik di pemerintahan dalam menjalankan tugasnya memiliki kesempatan untuk bertindak oportunistik yang akan mengutamakan kepentingan diri sendiri (Eisenhardt, 1989). Sehingga pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas keputusan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Dirienzo et al., 2007).

Oleh sebab itu, antara *agent* dan *principal* membutuhkan pihak ketiga yang independen yang dapat membantu masyarakat memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajiban sesuai dengan kepentingan masyarakat (Cressey, 1950). Dalam suatu negara pasti memiliki lembaga independen yang bertugas dalam menginvestigasi indikasi-indikasi korupsi pada suatu kelembagaan pemerintah, seperti KPK di Indonesia, SFO (*Serious Fraud Office*) di Inggris, FBI *Criminal Division* di Amerika, dll. Lembaga-lembaga tersebut kemudian memberikan dorongan kepada pemerintah untuk memberikan transparansi, akuntabilitas, dan akses sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Selaras dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah memperbaiki sistem pelayanan menjadi basis teknologi sebagai *e-Government* yang menghubungkan masyarakat secara *digital* dengan pemerintah agar dapat mengakses informasi maupun layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah (United Nations, 2003). Serta penguatan kebijakan yang mendukung peningkatan integritas publik (Pippidi & Dadašov, 2016). Sehingga penerapan sistem informasi berbasis teknologi dan penguatan integritas publik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas keputusan dan tanggung jawab pemerintah dalam memakmurkan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam mengontrol korupsi dan memerangi korupsi yang terjadi di suatu negara (World Bank, 2015).

2.2 Fraud

Berdasarkan perspektif pemerintah, *Commonwealth of Australia* mengatakan bahwa *Fraud* digambarkan sebagai suatu dorongan tindakan penipuan atau perilaku tidak jujur, yang melibatkan tindakan kelalaian atau pembuatan pernyataan palsu baik secara lisan maupun tertulis dengan tujuan memperoleh

uang atau berupa penghindaraan tanggung jawab (Warren et al., 2003). Lebih lanjut, *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) mengatakan bahwa *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: 1) penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), 2) kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), dan 3) korupsi (*corruption*).

Korupsi atau *fraud* yang terjadi pada sektor publik dapat berupa pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), suap (*bribery*), serta pemerasan (*economic extortion*) (BPKP, 2015). Dimana praktik tersebut melibatkan kekuasaan untuk meningkatkan keuntungan pribadi termasuk pemberian uang tunai “*under the table*” (World Bank, 2017). *Fraud* pada umumnya dapat terjadi pada sektor publik yang memiliki tekanan eksternal yang berasal dari politik serta kesempatan yang dapat muncul dari ketidakadilan legislatif dan peradilan negara, sistem teknologi yang buruk, serta pengambilan keputusan yang terpusat (World Bank, 2017).

Pada dasarnya, terdapat dorongan utama yang menimbulkan terjadinya kecurangan (*fraud*) terdiri dari tiga faktor, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Terdiri dari empat kelompok: 1) Tekanan finansial, seperti keserakahan, standar hidup terlalu tinggi, banyaknya tagihan hutang, kredit hamper jatuh tempo, dan kebutuhan hidup tidak terduga; 2) Tekanan akan kebiasaan buruk; 3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; 4) tekanan lainnya (Albrecht et al., 2011)

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Terjadinya *fraud* karena sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan yang layak dan sesuai, serta penyalahgunaan kekuasaan maupun jabatan. Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik dengan kedudukan tinggi karena dua persepsi dari kesempatan, yaitu: 1) informasi umum; dan 2) keterampilan teknis (Cressey, 1950).

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Merupakan pemikiran yang merasionalkan atau membenarkan tindakan melawan hukum seseorang pada saat sebelum melakukan tindak kecurangan sebagai sebuah

tindakan yang wajar yang secara moral dapat diterima masyarakat (Cressey, 1950).

Namun hingga saat ini *fraud* masih terus dikembangkan dalam rangka mencegah dan mendeteksi kecurangan di sektor industri. Seperti *Fraud Hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) yang mengatakan bahwa deketsi kecurangan dapat dilakukan dengan melihat 6 (enam) faktor, yaitu ego, rasionalisasi, kesempatan, kolusi, kemampuan, dan stimulus. Hal ini menunjukkan banyaknya dorongan untuk melakukan tindak kecurangan baik di sektor industri maupun publik yang memerlukan sistem dan integritas yang baik untuk dapat mencegahnya.

2.3 Persepsi Korupsi (*Corruptions Perception*)

World Bank (2015) mengatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dari sisi hukum, korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan masalah dan ancaman politik yang konstan terhadap demokrasi dunia, terlebih, korupsi sulit untuk diukur (Clark, 2017).

Dalam mengukur korupsi dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengukuran objektif (berbasis pengalaman) dengan menggunakan data untuk memperoleh perkiraan tingkat korupsi yang tepat; dan subjektif (berbasis persepsi) dengan penialain individu sebagai pengamat (Bandiera et al., 2008) Sementara banyak penelitian korupsi menggunakan indikator jumlah korupsi, pendekatan yang berbeda menggunakan indikator persepsi, salah satu yang paling populer adalah *Corruption Perceptions Index* (CPI) oleh *Transparency International* sejak tahun 1995. CPI menilai dan memberikan peringkat setiap tahun berdasarkan tingkat anggapan keberadaan atau bersihnya dari korupsi diantara pejabat publik dan politisi suatu negara dengan menggunakan indeks komposit yang disusun melalui pengambilan 13 *polls* dan *survey* dari 11 lembaga independen yang mengumpulkan data mengenai: suap di sektor publik;

penggelapan dana publik; dan evaluasi kekuatan serta efektifitas upaya anti korupsi di publik, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1. Sehingga skala yang dihasilkan oleh CPI berkisar 1 – 100 yang mengindikasikan semakin besar indeks yang diperoleh, maka semakin rendah tingkat persepsi korupsi di sebuah negara (Clark, 2017; Transparency International, 2022).

Tabel 1. Sumber Penilaian CPI

No.	Lembaga Independen
1.	<i>African Development Bank Governance Ratings</i>
2.	<i>Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators</i>
3.	<i>Bertelsmann Foundation Transformation Index</i>
4.	<i>Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings</i>
5.	<i>Freedom House Nations in Transit</i>
6.	<i>Global Insight Country Risk Ratings</i>
7.	<i>IMD World Competitiveness Yearbook</i>
8.	<i>Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence</i>
9.	<i>Political Risk Services International Country Risk Guide</i>
10.	<i>World Bank — Country Policy and Institutional Assessment</i>
11.	<i>World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS)</i>
12.	<i>World Justice Project Rule of Law Index</i>
13.	<i>Varieties of Democracy (VDEM) Project</i>

Sumber: Transparency International (2022)

Sebagai salah satu upaya memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi, pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas tanggung jawab pengelolaan negara oleh pemerintahan negara terkait (Mardiasmo, 2002). Salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengembangan *e-Government* dan Integritas Publik sebagai strategi anti-korupsi terhadap layanan publik dan menciptakan lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Castro & Lopes, 2022).

2.4 E-Government

Menurut World Bank (2001) *e-Government* mengacu kepada penggunaan sistem teknologi informasi oleh kelembagaan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, serta badan pemerintah lainnya dengan menggunakan jaringan area yang luas (*Wide Area Network*), internet, dan komputasi seluler (*mobile computing*). Disisi lain, ASPA (*American Society for Public Administration*) bersama UNDESA (*United Nations of Economics and Social Affairs*) mendefinisikan *e-Government* sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*) oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah kepada masyarakat (ASPA & UNDESA, 2001).

Dalam hal kaitannya *e-Government* dengan sistem informasi, Romney & Steinbart (2016) mengatakan terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan, yaitu: 1) *User*, yang terdiri dari pengguna sistem, baik pemerintah maupun masyarakat dan bisnis; 2) *Procedure* atau *Instruction*, berupa pemrosesan dan penyimpanan data pemerintah ke dalam sistem; 3) *Data*, yang merupakan representasi tanggung jawab pemerintah; 4) *Software*, berupa program komputer untuk proses data; 5) *Information Technology Infrastructure* berupa struktur jaringan komputer yang digunakan dalam *e-Government* seperti WAN; dan 6) *Internal Control and Security Measures* yang direpresentasikan oleh prinsip dasar *e-Government* yang didukung oleh kerangka *e-Governance* (tata kelola) yang efektif (ASPA & UNDESA, 2001).

Lebih lanjut, menurut Indrajit (2007) dalam buku *e-Government in Action* mendefinisikan *e-Government* sebagai suatu usaha menciptakan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi yang terbentuk dalam sistem informasi dan aktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. Dimana peningkatan teknologi sistem informasi sendiri merupakan salah satu bentuk dari pengendalian internal dalam suatu lembaga/organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kontrol internal, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan informasi dan komunikasi, serta

pemantauan kinerja yang baik (COSO, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Government* merupakan mekanisme interaksi yang *modern* antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan melibatkan penggunaan sistem teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja operasional pemerintah.

Peringkat *e-Government* dikembangkan dan publikasikan oleh UN *E-Government Knowledgebase* oleh *Division for Public Institutions and Digital Government* (DPIDG) di UNDESA. Peringkat tersebut didasarkan pada beberapa indikator penilaian atas efektifitas pengembangan *e-Government* pada suatu negara, diantaranya adalah:

1. *Human Capital Index*

Indikator ini mengukur kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara (UNDESA, 2022). Penilaian ini dilakukan oleh UNESCO dengan menganalisis empat subindeks yaitu: tingkat melek huruf orang dewasa (1/3), rasio pendaftaran sekolah dasar, menengah, dan tinggi (2/9), tahun sekolah yang diharapkan (2/9), serta rata-rata tahun bersekolah (2/9).

2. *Telecommunications Infrastructure Index*

Indikator ini memberikan indikasi atas penerapan infrastruktur telekomunikasi pada suatu negara. *International Telecommunication Union* (ITU) mengumpulkan data *Telecommunication Infrastructure Index* yang merupakan nilai rata-rata dari persentase penggunaan internet selama tiga bulan terakhir, langganan *mobile-cellular* per 100 penduduk, langganan *active mobile-broadband* per 100 penduduk, dan langganan *fixed broadband* per 100 penduduk (UNDESA, 2022).

3. *Online Services Index*

UNDESA (2022) menyatakan bahwa indikator ini merupakan indikator pembaruan yang paling komprehensif dimana indikator ini menilai ruang lingkup dan kualitas layanan *online* yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan *stakeholder*. *Online Services Index* terdiri dari lima subindeks yaitu: kerangka kelembagaan (10%), penyediaan layanan (45%), penyediaan konten (5%), teknologi (5%), dan *e-participant* (35%).

Ruang lingkup dalam *e-Government* mencakup: 1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (*G2C-Government to Citizen*) berupa penyampaian layanan publik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; 2) interaksi antara pemerintah dengan perusahaan bisnis (*G2B-Government to Business*) dengan melibatkan transaksi khusus dan layanan bisnis; dan 3) hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah (*G2G-Government to Government*) termasuk pertukaran data dan elektronik antar pemerintah. *E-Government* dinilai dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara yang didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya:

1. Sistem informasi akan meningkatkan transparansi pemerintah dengan memperluas akses informasi dengan kualitas yang lebih baik sehingga masyarakat maupun pihak swasta atau bisnis dapat mempertanyakan keputusan yang sewenang-wenang dan prosedur yang tidak masuk akal atau mencurigakan (Dwivedi et al., 2009; dan Gautam et al., 2017).
2. *E-Government* dapat membatasi kesewang-wenangan aparatur pemerintah dengan mengurangi kekuasaan diskresioner pegawai negeri dan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat serta bisnis atau swasta guna melakukan pengawasan atas keputusan pejabat dan politisi (Elbahnasawy, 2014; Gautam et al., 2017; Klitgaard, 1998).
3. Mengurangi tindakan monopoli unsur-unsur pemerintahan oleh kelas politik dan menurunkan interaksi antara pejabat pemerintah dan masyarakat (Gautam et al., 2017; Klitgaard, 1998).
4. Sistem informasi dalam penggunaan *e-Government* akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya (Bwalya & Zulu, 2012; Gautam et al., 2017; Klitgaard, 1998).

2.5 Public Integrity

Integritas merupakan reputasi yang dapat dipercaya atau kredibel dan kejujuran seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan” dalam konteks organisasi (Hosmer, 1995). Sedangkan Integritas Publik diartikan sebagai sikap keselarasan yang konsisten dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika bersama, prinsip, maupun

norma dalam lembaga publik demi menjunjung tinggi dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi (OECD, 2020). Integritas merupakan salah satu pilar dalam landasan pemerintahan dan organisasi untuk menjunjung nilai akuntabilitas dan transparansi melalui struktur politik, ekonomi, maupun sosial sehingga mampu mencegah dan memerangi korupsi.

Index of Public Integrity (IPI) merupakan indeks yang menilai tingkat integritas publik yang dimiliki suatu negara. Indeks ini diinisiasi oleh Pippidi & Dadašov (2016) dalam *European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building* (ERCAS), *Anti-Corruption & Governance Center* (ACGC), dan *Center for International Private Enterprise* (CIPE) yang mendefinisikan IPI sebagai gabungan atas indikator-indikator paling kuat secara statistik dan relevan dengan kebijakan kelembagaan sebagai faktor penentu pengendalian korupsi. Indeks tersebut mengukur integritas publik dari 120 negara dengan menjelaskan lebih dari 75% variasi pengendalian korupsi lintas negara yang diukur dengan indikator dari *World Bank* (World Bank, 2001).

Index of Public Integrity mendefinisikan korupsi sebagai keseimbangan antara peluang untuk korupsi (seperti kekuasaan dan sumber daya material, seperti uang publik yang tidak transparan) dengan hambatan yang dimiliki organisasi otonom (seperti peradilan, media), kelompok (masyarakat sipil), dan individu (pemilih, *whistleblower* atau pelapor) yang dapat digunakan untuk mencegah pemegang kekuasaan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan mereka sendiri (ERCAS & CIPE, 2016). Sehingga membagi kelompok indikator ke dalam dua sisi, yaitu sumber daya (*resources*) dan kendala (*constraints*) dengan menggunakan ukuran indikator-indikator yang memiliki kekuatan secara statistik yang dapat mempengaruhi kontrol atas korupsi, diantaranya adalah:

1. Administrative Burden – Administrative Transparency

Administrative Burden merupakan indikator yang terdiri dari rata-rata jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai bisnis bagi pria dan wanita, waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis bagi pria dan wanita, jumlah pembayaran pajak per tahun, dan waktu yang diperlukan untuk membayar pajak. Penilaian tersebut diinisiasi dan dihimpun oleh *World Bank* melalui *Doing Business Data* dengan

skala hasil 1 – 10 yang mengindikasikan bahwa semakin besarnya skor yang dihasilkan maka semakin rendahnya beban administrasi yang dimiliki suatu negara (World Bank, 2015).

Namun indikator tersebut telah diberhentikan sejak tahun 2020 karena pemberhentian pelaporan *Doing Business Data* dan digantikan oleh indikator *Administrative Transparency* yang dinilai dapat memberikan pengaruh lebih kuat. Dimana indikator *Administrative Transparency* ini juga mengukur waktu dan prosedur untuk memulai sebuah bisnis serta waktu dan tata cara dalam membayar pajak. Namun pada indikator ini terdiri dari jumlah standar skor individu menggunakan indeks transparansi (*T-Index*) dengan kisaran nilai 1-10 yang ditinjau oleh tim ERCAS menggunakan indeks *de jure* dan *de facto*. Semakin besar angka *T-Index* yang dihasilkan maka memberikan indikasi yang lebih transparan (ERCAS & CIPE, 2016).

Tabel 2. Metodologi Pengukuran *Administrative Transparency*

<i>De Jure Index</i>	
1.	Ratifikasi <i>United Nations Convention Againsts Corruption</i> (UNCAC)
2.	Anggota dari <i>Open Government Partnership</i> (OGP)
3.	FOI hadir dalam Undang-Undang nasional
4.	Ratifikasi OECD <i>Anti-Bribery – The WTO Agreement on Government Procurement</i> (GPA) – <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i> (CPTPP)
5.	<i>Financial Action Task Force</i> (FATF) melawan pencucian uang atau yang setara
<i>De Facto Index</i>	
Q1	Apakah pengeluaran publik sebelumnya dipublikasikan secara online?
Q2	Apakah pengeluaran publik saat ini dipublikasikan secara online?
Q3	Apakah ada portal pengadaan publik terpusat di mana tender dan pemberian kontrak dipasang?
Q4	Apakah ada kadaster tanah online di mana kepemilikan properti diungkapkan?
Q5	Apakah ada daftar perdagangan tempat pemegang saham dan data utama perusahaan dipublikasikan?
Q6	Apakah Laporan Tahunan BPK diumumkan kepada publik?
Q7	Apakah jadwal sidang Mahkamah Agung bersifat publik dan dapat

	diakses secara online?
Q8	Apakah hukuman mahkamah agung dipublikasikan secara online?
Q9	Apakah pengungkapan keuangan pejabat publik tersedia secara online?
Q10	Apakah pengungkapan konflik kepentingan pejabat tersedia untuk umum secara online?
Q11	Apakah alokasi dana donor yang masuk dan keluar dipublikasikan?
Q12	Apakah konsesi pertambangan diposting secara publik?
Q13	Apakah izin konstruksi di ibu kota negara diumumkan secara publik?
Q14	Apakah ada surat kabar online atau portal pemerintah yang menerbitkan semua undang-undang resmi untuk diakses semua orang?

Sumber: ERCAS & CIPE, 2022

2. Budget Transparency

Budget Transparency merupakan akses yang dimiliki publik atas pemerintah pusat mengenai usulan anggaran pemerintah. Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan salah satunya Proposal Anggaran Eksekutif berdasarkan hasil survey atas 102 pertanyaan yang dilakukan oleh *Open Budget Survey* (OBI). Data tersebut diperoleh dari negara yang termasuk dalam *International Budget Partnership* (IBP) dengan skala penilaian 1–10 yang menindikasikan bahwa semakin besar nilai yang dimiliki maka semakin baik tingkat transparansi dan semakin terbukanya anggaran pemerintah pada suatu negara (*International Budget Partnership*, 1998).

Tabel 3. Metodologi *Budget Transparency Index*

Ikhtisar	Metodologi
Transparansi	Pernyataan Pra-Anggaran – Usulan Anggaran Eksekutif – Anggaran yang Ditetapkan – Anggaran Masyarakat – Laporan Tahunan – Laporan Tengah Tahun – Laporan Akhir Tahun – Laporan Audit
Partisipasi Publik	Perumusan (eksekutif) – Persetujuan (legislatif) – Implementasi (eksekutif) – Audit (lembaga audit tertinggi)
Pengawasan Anggaran	Pengawasan Legislatif – Pengawasan Audit

Sumber: *International Budget Partnership* (1998)

3. *Open Tradeness – Online Services*

Merupakan indikator yang menilai waktu dan jumlah atas prosedur dalam kegiatan impor maupun ekspor dari suatu negara. Indikator ini terdiri dari rata-rata nilai atas waktu dan biaya yang diperlukan untuk kepatuhan perbatasan dalam prosedur ekspor dan impor. Indikator ini diinisiasikan oleh *World Bank* melalui *Doing Business Data* dengan skala penilaian 1-10 yang mengindikasikan bahwa semakin mendekati angka 10 maka semakin memberikan isyarat atas terbukanya perdagangan yang tinggi (World Bank, 2001).

Namun sejak tahun 2020, *Open Tradeness* digantikan *Online Services* sebagai indikator *Constraints* karena pemberhentian pelaporan *Doing Business Data*. Skor *Online Services* diperoleh dari *UN E-Government Development Index* dengan indikator 0 (tidak memiliki layanan *online*) dan 1 (memiliki layanan *online*). Kemudian indikator tersebut distandarisasi ke dalam ukuran skala 1-10 yang mengindikasikan bahwa semakin besar skor yang diperoleh maka semakin baik pelayanan *Online* yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya (United Nations, 2003).

Tabel 4. Metodologi *Online Services Index*

Subsindex	Proporsi
Kerangka Kelembagaan	10%
Penyediaan Layanan	45%
Penyediaan Konten	5%
Teknologi	5%
<i>e-Participation</i> (EPI)	35%

Sumber: United Nations (2003)

4. *E-Citizenship*

E-Citizenship merupakan indikator yang menilai penggunaan internet, langganan broadband, serta penggunaan aplikasi *Facebook* di suatu negara. Indikator ini menggunakan merata-ratakan nilai standar tersebut ke dalam bentuk persentase atas populasi dari suatu negara. Pada poin penggunaan internet dan langganan broadband ditinjau oleh *ICT Dataset International Telecommunication Union*, sementara penggunaan aplikasi *Facebook* ditinjau oleh *Internet World Stats*

dengan skala 1-10 yang mengindikasikan bahwa semakin besar nilai yang diperoleh maka memberikan isyarat semakin tingginya *e-Citizenship* suatu negara (International Telecommunication Union, 2005; Internet World Stats, 2005).

Tabel 5. Metodologi *E-Citizenship*

Indikator	Penilaian
Langganan <i>Fixed Broadband</i>	% Populasi
Pengguna <i>Internet</i>	% Populasi
Pengguna <i>Facebook</i>	% Populasi

Sumber: International Telecommunication Union (2005); Internet World Stats (2005)

5. *Freedom of The Press*

Indikator *Freedom of the Press* merupakan indikator yang menilai kebebasan media, publik, masyarakat sipil, maupun warga negara dalam menyampaikan suara maupun memantau penyimpangan norma yang terjadi di suatu negara. Indikator ini menggunakan pengukuran yang ditinjau oleh *Reporters Without Border's Press Freedom Index* dengan skala penilaian 0 (paling buruk) hingga 100 (paling baik) yang distandarisasi menggunakan skala 1-10 dengan arti bahwa semakin mendekati angka 10, maka akan semakin bebas media dalam bersuara dan memantau penyimpangan norma pada suatu negara (Reporters Without Border, 2009). Perhitungan indeks ini didasarkan pada perhitungan dua komponen: a) perhitungan kuantitatif pelanggaran jurnalis; dan b) analisis kualitatif situasi negara menggunakan kuesioner dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 6. Metodologi *Freedom of the Press Index*

Indikator	Jumlah Kuesioner
Konteks Politik	33 pertanyaan dan sub pertanyaan
Kerangka Hukum	25 pertanyaan dan sub pertanyaan
Konteks Ekonomi	25 pertanyaan dan sub pertanyaan
Konteks Sosiokultural	22 pertanyaan dan sub pertanyaan
Keamanan	12 pertanyaan dan sub pertanyaan

Sumber: (Reporters Without Border, 2009)

6. *Judicial Independence*

Judicial Independence merupakan indikator yang mengukur kemandirian/independensi peradilan dari pengaruh pemerintah, masyarakat maupun bisnis atau perusahaan di suatu negara. Indikator ini diinisiasi dan ditinjau oleh *World Economic Forum* (WEF) dalam *Global Competitiveness Dataset* dengan memberikan pertanyaan mengenai sejauh mana peradilan di suatu negara adalah independen dari pengaruh anggota pemerintah, warga negara, maupun perusahaan, dengan skala 1 (sangat dipengaruhi) hingga 7 (sepenuhnya independen). Kemudian indikator tersebut distandarisasi ke dalam skala 1-10 yang mengindikasikan bahwa semakin mendekati 10 maka peradilan suatu negara semakin mandiri atau independen (World Economic Forum, 2015).

Tabel 7. Metodologi *Judicial Independence Index*

<i>Global Competitiveness Index</i>		
Subindeks Persyaratan Dasar	Subindeks Peningkatan Efisiensi	Subindeks Faktor Inovasi dan Kecanggihan
Pilar 1. Lembaga	Pilar 5. Pendidikan dan Pelatihan Tinggi	Pilar 11. Kecanggihan Bisnis
Pilar 2. Infrastruktur	Pilar 6. Efisiensi Pasar Barang	Pilar 12. Inovasi
Pilar 3. Lingkungan Makroekonomi	Pilar 7. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	
Pilar 4. Kesehatan dan Pendidikan Dasar	Pilar 8. Perkembangan Pasar Keuangan	
	Pilar 9. Kesiapan Teknologi	
	Pilar 10. Ukuran Pasar	

Sumber: World Economic Forum (2015)

2.6 *Control of Corruption*

Control of Corruption diinisiasi oleh Kaufmann et al. (2010) yang mengukur kekuatan dan efektifitas kerangka kebijakan maupun kelembagaan suatu negara dalam menghindari dan memerangi korupsi melalui sejauh mana kekuasaan publik yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil maupun besar, serta peran elit (World Bank, 1996). Aspek yang digunakan dalam indikator ini mulai dari korupsi pada pegawai publik, korupsi

yang menghalangi bisnis, korupsi yang mengancam investasi asing, jumlah kasus korupsi, praktik yang tidak sesuai dengan pelayanan, hingga frekuensi penggunaan uang pelicin. Artinya, negara dengan penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang tinggi mengindikasikan lemahnya kontrol negara atas korupsi, begitu pula sebaliknya.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengurangi asimetri informasi dan mengurangi kebijakan diskresi yang dapat memicu tindakan korupsi, pemerintah negara perlu meningkatkan pengembangan sistem *e-Government* dan penguatan kebijakan yang mendukung *Public Integrity* (*Administrative Transparency, Budget Transparency, Online Service, E-Citizenship, Judicial Independence, dan Freedom of the Press*) sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap korupsi. Sehingga indeks *Control of Corruption* sesuai dengan tujuan penelitian untuk meneliti sejauh mana *e-Government* dan penilaian integritas publik berkontribusi dalam menekan kesempatan yang digunakan oleh pejabat publik dalam menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi.

Control of Corruption secara metodologi dan pendekatan memiliki perbedaan dengan *Corruption Perception Index* (CPI) dimana *Control of Corruption* menggunakan pendekatan *bottom-up* oleh masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, pakar hukum, dll. sebagai pihak independen yang dapat mencegah serta melawan korupsi. Sedangkan CPI menggunakan pendekatan *top-down* oleh lembaga survey internasional, para ahli dan akademisi, lembaga independen, dll. dengan mengukur pandangan sejauh mana negara memiliki sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif dengan berbagai pengukuran yang kompleks (Transparency International, 2022). *Control of Corruption* menilai sebatas pada bagaimana negara memiliki sistem kontrol yang dapat mencegah dan mengontrol korupsi. Sementara CPI menilai bagaimana sistem yang dimiliki pemerintahan dapat mencegah dan berhasil menurunkan tingkat korupsi sehingga menciptakan persepsi bahwa negara bersih dari korupsi. Oleh sebab itu, *Control of Corruption* yang efektif dapat menjadi salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi Persepsi Korupsi (CPI). Sehingga untuk dapat memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi, negara perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang

dapat mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi agar efektif dan efisien (Oktavia et al., 2022).

Berdasarkan penilaian *Worldwide Governance Indicators* (WGI) oleh World Bank (1996) mengklasifikasikan *Control of Corruption* sebagai bagian dari tata kelola agregat dengan survey di lebih dari 200 negara sejak 1996 – 2021 bersama lima dimensi tata kelola lainnya, yaitu: *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Governance Effectiveness*, *Regulatory Quality*, dan *Rule of Law*. *Control of Corruption* di ukur melalui tiga tahap penilaian, yaitu:

1. Mengumpulkan data dari sumber-sumber yang sesuai sebagaimana metodologi survey yang digunakan dalam pengukuran indikator *Control of Corruption* berikut:

Tabel 8. Metodologi Pengukuran *Control of Corruption*

Indikator	Sumber
Korupsi di kalangan pejabat publik	<i>Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index (EIU)</i>
Kepercayaan masyarakat terhadap politisi Pengalihan dana publik Pembayaran tidak teratur – ekspor, impor, utilitas publik, pengumpulan pajak, kontrak publik, keputusan pengadilan	<i>World Economic Forum Global Competitiveness Report (GCS)</i>
Apakah korupsi di pemerintahan meluas?	<i>Gallup World Poll (GWP)</i>
Tingkat korupsi kecil-kecilan antara pemerintah dan – warga negara, pengusaha lokal, juga perusahaan asing	<i>Institutional Profiles Database (IPD)</i>
Korupsi	<i>Political Risk Services International Country Risk Guide (PRS)</i>
Indeks Korupsi	<i>Varieties of Democracy Project (VDM)</i>
Korupsi (risiko korupsi bisnis lainnya)	<i>Global Insight Business Conditions and Risk Indicators (WMO)</i>

Sumber: World Bank (1996)

2. Melakukan pengukuran skala ulang data sumber dengan ukuran 0 sampai 1 dengan indikasi negara dengan nilai skala yang lebih tinggi maka memiliki kontrol atas korupsi yang lebih baik (World Bank, 1996).
3. Menggunakan *Unobserved Components Model* (UCM) dalam menyusun rata-rata tertimbang indikator *Control of Corruption* dari setiap sumber data, sehingga menghasilkan ukuran *Control of Corruption* yang baku yang berasal dari sumber yang beragam dengan skala nilai dalam kisaran -2,5 hingga 2,5. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar nilai yang diperoleh maka semakin baik *Control of Corruption* yang dimiliki suatu negara (World Bank, 1996).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 9. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Conceicao Castro & Isabel Cristina Lopes (2022)	<i>E-Government as a Tool in Controlling Corruption</i>	-e-Government memiliki pengaruh terhadap pengendalian korupsi -political stability, accountability, sound regulation, income, and the use of the internet dapat meredam korupsi
Alina Mungiiu Pippidi & Ramin Dadasov (2016)	<i>Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity (2016)</i>	<i>Index of Public Integrity</i> memiliki korelasi sebesar: 88% terhadap WGI <i>Control of Corruption</i> 83% terhadap ICRG <i>Corruption</i> 89% terhadap CPI 70% terhadap WEF <i>Diversion of Public Funds</i> -46% terhadap PACI Escresa&Picci -78% terhadap <i>Single bidding Fazekas&Toth</i>

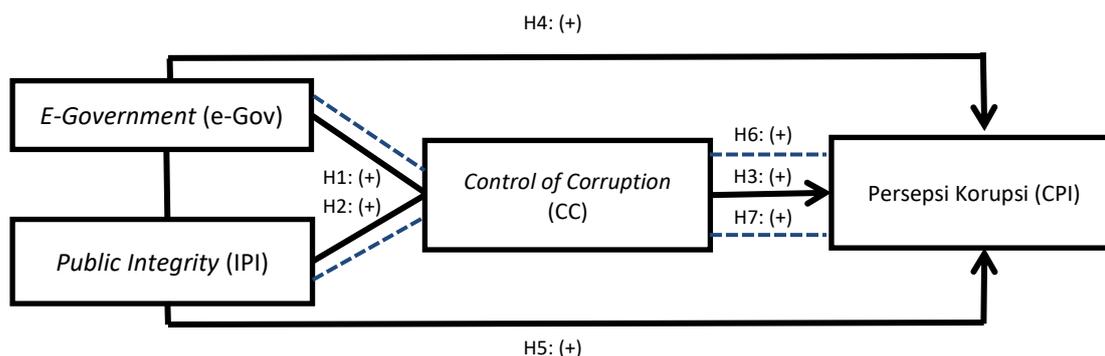
<p>April K. Clark (2017)</p>	<p><i>Measuring Corruption: Transparency International's "Corruption Perception Index"</i></p>	<p><i>Control of Corruption</i> tidak sepenuhnya dipahami, namun umumnya korupsi tumbuh subur karena tingkat pendidikan yang rendah dengan masyarakat sipil yang terbelakang, dan akuntabilitas dari institusi publik yang lemah.</p>
<p>Prakrit Silal; Ashutosh Jha; dan Debashis Saha (2023)</p>	<p><i>Examining the Role of E-Government in Controlling Corruption: A Longitudinal Study</i></p>	<p>H1: Level E-Gov mempengaruhi secara positif terhadap peningkatan kontrol korupsi (Diterima) H2: Human Capital berpengaruh positif terhadap kontrol korupsi (Diterima) H3: Infrastruktur Teknologi berpengaruh positif terhadap kontrol korupsi (Diterima) H4: Pelayanan Online berpengaruh positif terhadap kontrol korupsi (Ditolak)</p>
<p>Nasr G. Elbahnasawy (2014)</p>	<p><i>E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>e-Government</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengurangan korupsi - <i>e-Government</i> meningkatkan transparansi dan akuntabilitas - <i>Internet adoption</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap korupsi
<p>Ika Yuliyana & Dyah Setyaningrum (2016)</p>	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Government</i> dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementrian/Lembaga</p>	<p>H1: E-Gov berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi (Diterima) H2: Akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi (Diterima) H3: Temuan Audit atas kepatuhan perundang-</p>

		undangan dan sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap perspektif korupsi (Diterima) H4: Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap perspektif korupsi (Diterima)
Pius Lustrilanang; Suwarno; Darusalam; Lutfi Trisandi Rizki; Normah Omar; dan Jamaliah Said (2023)	<i>The Role of Control of Corruption and Quality of Governance in ASEAN: Evidence from DOLS and FMOLS Test</i>	H1: Terdapat hubungan antara <i>control corruption</i> dengan kualitas <i>governance</i> (Diterima) H2: Terdapat hubungan antara kualitas <i>governance</i> dengan <i>control of corruption</i> (Diterima)
Reni Oktavia; Fajar G. Dewi; dan Syaharani N. Fathia (2022)	<i>The Global Study: Tackle Corruption through Good Government Governance</i>	Y: CPI Berpengaruh Positif X1: <i>Voice and Accountability</i> (Diterima) X2: <i>Political Stability</i> X3: <i>Government Effectiveness</i> (Diterima) X4: <i>Regulatory Quality</i> X5: <i>Rules of Law</i> X6: <i>Control of Corruption</i>
Isabel Brusca; Francesca Manes; Rossi; dan Natalia Aversano (2017)	<i>Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis</i>	H1: Semakin besar transparansi semakin tinggi skor korupsi, persepsi korupsi dan kepercayaan pada pemerintah (Diterima) H2: Semakin tinggi kualitas sistem pengelolaan keuangan maka semakin tinggi pula skor korupsi, persepsi korupsi dan kepercayaan terhadap pemerintah. (Diterima) H3: Semakin kuat peran BPK

		semakin baik skor korupsi, persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah (Ditolak)
Maria Cimpoeru & Valentin Cimpoeru (2015)	<i>Budgetary Transparency - an Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance</i>	H1: Lever korupsi di negara X berhubungan dengan level <i>budgetary transparency</i> dan GDP (Diterima)

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang serta penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini yang dapat di rangkai adalah:



Gambar 5. Kerangka Penelitian

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh *e-Government* terhadap *Control of Corruption*

Pada umumnya, pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat memiliki informasi yang lebih mengenai administrasi negara sehingga menimbulkan asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dengan masyarakat sehingga sering kali menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*), yaitu korupsi (Jensen & Meckling, 1976). Oleh sebab itu, diperlukan adanya lembaga independen yang baik yang dapat mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintah sesuai kepentingan masyarakat (Cressey, 1950).

Salah satu bentuk kontrol korupsi tersebut dapat berupa pengembangan *e-Government* yang baik (World Bank, 2017; dan Indrajit, 2007). *E-Government* diterapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan kinerja pemerintah dengan efektifitas sumber daya yang dimiliki (*Human Capital*) melalui kualitas pendidikan; efektifitas penggunaan teknologi melalui *Infrastructure Telecommunication* dan *Online Services* (UNDESA, 2022).

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa *e-Government* memiliki pengaruh positif terhadap *Control of Corruption*, dimana *e-Government* yang semakin baik akan meningkatkan kemampuan negara dalam mengontrol korupsinya (Castro & Lopes, 2022; Chen & Aklikokou, 2019; Taewoo, 2018). Lebih lanjut, Silal et al. (2023) menyimpulkan bahwa implementasi *e-Government* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kontrol atas korupsi pada seluruh negara. Dimana pengembangan *e-Government* yang dilakukan oleh pemerintah negara terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang mampu mengontrol tingkat korupsi suatu negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi asimetri informasi, lembaga independen anti-korupsi perlu memberikan penekanan kepada negara melalui penyediaan layanan berbasis teknologi yang baik yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga mampu mengontrol korupsi suatu negara. Oleh sebab itu, pengembangan *e-Government* suatu negara dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengontrol dan menekan tingkat korupsi yang terjadi pada negara tersebut. Sehingga hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:

H1: *e-Government* berpengaruh positif terhadap *Control of Corruption*

2.9.2 Pengaruh *Public Integrity* terhadap *Control of Corruption*

ACFE (2016) membagi *fraud* ke dalam tiga bentuk, salah satunya adalah korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat

menjadi pendorong tindakan korupsi. Sehingga diperlukan tindakan pencegahan melalui peningkatan Integritas Publik. Pippidi & Dadašov (2016) mengatakan bahwa *Index of Public Integrity* (IPI) merupakan indeks yang terdiri dari indikator-indikator yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengendalian korupsi dari aspek sosial, hukum, hingga ekonomi.

Sehingga untuk dapat menghasilkan kontrol korupsi secara efektif, pemerintah suatu negara dapat memperhatikan beberapa aspek penting dalam integritas publik yang menyeimbangkan peluang korupsi dengan pengawasan oleh masyarakat dan ketegasan dalam independensi peradilan maupun *press*, selanjutnya tergabung dalam *Index of Public Integrity* (ERCAS & CIPE, 2016). Integritas publik ditunjukkan oleh transparansi administrasi dan *budgeting* serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital yang menekan asimetri informasi sehingga dapat mengontrol korupsi, namun sebaliknya, transparansi dan penggunaan teknologi yang kurang akan meningkatkan kesempatan pejabat publik untuk melakukan tindak korupsi. Sedangkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam media sosial dan independensi peradilan maupun *press* akan meningkatkan pengawasan publik dan menghambat kebebasan untuk melakukan korupsi sehingga dapat mengontrol tingkat korupsi kedepannya (Pippidi & Dadašov, 2016).

Penelitian terdahulu yang meneliti *Public Integrity* sebagai variabel yang mempengaruhi kontrol atas korupsi menemukan bahwa *Public Integrity* memiliki pengaruh yang kuat terhadap *Control of Corruption*, *Corruption Perceptions Index* (CPI), dan *International Country Risk Guide* (ICRG) dengan lebih dari 80% (Pippidi & Dadašov, 2016). *Budgetary Transparency* mempengaruhi tata kelola suatu negara, termasuk kontrol atas korupsi (Cimpoeru & Cimpoeru, 2015; Montes & Luna, 2020; Seifert et al., 2014; Yuliant et al., 2020). Lebih lanjut, dari segi aspek sosial dan hukum melalui partisipasi masyarakat secara *online* dan independensi *press* maupun peradilan juga turut membantu negara dalam meningkatkan kontrol korupsinya (Brusca et al., 2017; Maolani et al., 2021; Vadlamannati & Cooray, 2016; Zamzam, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa *Public Integrity* yang menekan kesempatan melakukan tindak korupsi dengan meningkatkan hambatan

yang muncul dari pengawasan publik dapat membantu negara dalam mengontrol korupsi, dimana semakin tinggi nilai *Public Integrity* suatu negara maka akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengontrol tingkat korupsi. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

H2: *Public Integrity* memiliki pengaruh positif terhadap *Control of Corruption*

2.9.3 Pengaruh *Control of Corruption* terhadap Persepsi Korupsi

Untuk dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, tata kelola yang baik perlu untuk dikembangkan dan diimplementasikan melalui transparansi dalam pencapaian tujuan dan penilaian kinerja suatu pemerintahan (Mardiasmo, 2002; Soekrisno, 2013). Dalam merancang *Good Government Governance*, *World Bank* dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) merancang enam indikator penilaian kualitas tata kelola suatu negara, salah satunya *Control of Corruption* yang menilai sejauh mana kekuasaan publik yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi (World Bank, 1996). *Control of Corruption* yang baik menunjukkan menunjukkan kualitas tata kelola dan kemampuan negara dalam mengontrol tingkat korupsinya, baik di lingkungan masyarakat sipil, bisnis, maupun hukum. Sehingga perlu bagi suatu negara untuk memperhatikan tingkat *Control of Corruption* untuk dapat memperbaiki persepsi atas korupsi di suatu negara.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa *Control of Corruption* yang merupakan bagian dari *Government Governance* dapat mengurangi tingkat korupsi sehingga memperbaiki persepsi korupsi bagi pihak eksternal independen (Inawati & Sabila, 2021; Welch, 2020). Lebih lanjut, Lustrilanang et al. (2023) mengatakan bahwa *Control of Corruption* menunjukkan tingkat korupsi suatu negara sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan negara dalam menekan tingkat korupsinya. Selain itu, Pippidi & Dadašov (2016) juga menyimpulkan bahwa *Control of Corruption* memiliki pengaruh hingga 89% terhadap CPI yang menunjukkan bahwa untuk memperbaiki persepsi korupsi, negara dapat

memperbaiki tata kelolanya dalam menghindari dan menekan tingkat korupsi kedepannya.

Penjelasan dan hasil penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola yang baik yang dilihat dari kemampuan negara dalam mengontrol korupsinya akan mampu memperbaiki persepsi korupsi negara tersebut sehingga menghasilkan persepsi yang positif. Sehingga peningkatan *Control of Corruption* suatu negara, akan meningkatkan persepsi korupsi yang mengindikasikan rendahnya tingkat korupsi yang terjadi. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang dapat disusun adalah:

H3: *Control of Corruption* berpengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi

2.9.4 Pengaruh *e-Government* terhadap Persepsi Korupsi

Asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dan bisnis menciptakan peluang bagi pejabat publik untuk memanfaatkan kesempatannya guna meningkatkan keuntungan pribadi sehingga menciptakan tindak korupsi (ACFE, 2016). ASPA & UNDESA (2001) telah menginisiasikan *e-Government* sebagai revolusi teknologi di sektor publik dengan tujuan: meningkatkan partisipasi masyarakat serta bisnis sebagai pengawasan atas keputusan pemerintah (Klitgaard, 1998); transparansi dengan meningkatkan akses dan kualitas informasi sehingga masyarakat dan bisnis dapat mempertanyakan keputusan pemerintah dan prosedur yang tidak masuk akal atau mencurigakan (Dwivedi et al., 2009); dan meningkatkan akuntabilitas atas tanggung jawab pemerintah (Gautam et al., 2017). Sehingga pengembangan dan peningkatan *e-Government* dapat sejalan dengan tujuan negara dalam menekan tingkat korupsinya untuk memperbaiki persepsi korupsi yang dimilikinya.

Dalam *e-Government* menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan pemaanan teknologi serta peningkatan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik akan memperbaiki tata kelola negara menjadi lebih baik. Sehingga dapat menekan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi karena penggunaan teknologi yang memperpendek alur pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien (World Bank, 2001).

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik terkait menyimpulkan bahwa penerapan dan pengembangan *e-Government* memiliki pengaruh positif terhadap persepsi korupsi (CPI) (Pippidi & Dadašov, 2016; Yuliyana & Setyaningrum, 2016). Sementara Maria & Halim (2017) menyimpulkan bahwa implementasi *e-Government* berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hasil penelitian tersebut pada intinya mengatakan bahwa penerapan *e-Government* yang lebih baik akan dapat membantu menekan tingkat korupsi dengan arah hubungan yang negatif, sehingga dapat memperbaiki persepsi korupsi dengan arah hubungan yang positif.

Perbedaan arah penelitian tersebut disebabkan oleh CPI yang memberikan indikasi mengenai persepsi atau pandangan organisasi internasional independent terhadap korupsi di suatu negara, sehingga semakin tinggi nilai CPI maka semakin baik anggapan mengenai korupsi suatu negara karena rendahnya tingkat korupsi, begitu pula sebaliknya (Clark, 2017).

Berdasarkan penjelasan serta penelitian terdahulu diatas mengindikasikan bahwa *e-Government* yang semakin dikembangkan menjadi lebih baik akan mewujudkan implementasi tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, peningkatan nilai *e-Government* akan membantu memperbaiki persepsi suatu negara dalam mencegah dan menindak korupsi dengan efektif. Rumusan hipotesis keempat yang dapat disusun adalah:

H4 : *e-Government* memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi

2.9.5 Pengaruh *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi

Asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dikurangi dengan mengimplementasikan tata kelola negara yang efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah Pippidi & Dadašov (2016). Banyak aspek-aspek penting yang saling berdampingan dan harus diperhatikan untuk dapat mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun hukum. *Public Integrity* merupakan kombinasi ketiga aspek tersebut dengan pemahaman bahwa

sektor publik dapat mencapai integrasi apabila kesempatan yang dapat digunakan untuk melakukan tindak korupsi dapat dihambat dengan pengawasan oleh masyarakat, *press*, dan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik ERCAS & CIPE (2022). Sehingga IPI dinilai dapat meningkatkan efektifitas kontrol korupsi suatu negara yang akan memperbaiki persepsi korupsi negara terkait.

Indeks IPI merupakan indeks baru sejak tahun 2016 sehingga terdapat keterbatasan pada penelitian terdahulu. Terlepas dari hal tersebut, penelitian terdahulu telah dilakukan terkait masing-masing indikator di dalam IPI. Penelitian oleh Pippidi & Dadašov (2016), menyimpulkan bahwa setidaknya IPI mempengaruhi CPI sebesar 89%, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan integritas publik akan menghasilkan persepsi korupsi yang lebih baik. Sebagaimana sebelumnya, Seifert et al. (2014) mengatakan transparansi anggaran yang merupakan salah satu indikator IPI, dapat digunakan sebagai penilaian transparansi *budget* yang andal. Lebih lanjut, tingkat transparansi yang lebih tinggi; partisipasi masyarakat yang efektif; serta *press* dan peradilan negara yang semakin independen dari intervensi politik akan meningkatkan persepsi korupsi dan kepercayaan publik bahwa pemerintah bebas dan mengatasi korupsi dengan baik (Brusca et al., 2017; Maolani et al., 2021; Vadlamannati & Cooray, 2016; Zamzam, 2016).

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu diatas, *Public Integrity* yang mengkombinasikan bebrbagai aspek yang efektif dan efisien dalam mencegah dan mengatasi korupsi dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan dalam mengatasi korupsi suatu negara, sehingga negara dengan integritas publik yang baik akan menghasilkan persepsi bahwa negara dapat mengontrol korupsi dengan lebih baik. Oleh sebab itu, maka hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah:

H5 : *Public Integrity* memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi

2.9.6 Control of Corruption Berperan Sebagai Intervening dalam Pengaruh *e-Government* terhadap Persepsi Korupsi

Pada teorinya, untuk mengurangi asimetri informasi negara dapat mengembangkan penerapan *e-Government* karena merupakan salah satu alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Bergman & Lane, 1990; United Nations, 2015). Sehingga untuk memastikan bahwa pemerintah telah efektif menjalankan kebijakan tanpa terjadi korupsi, memerlukan pihak mediator yang dapat memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat dan memastikan baiknya sistem pemerintah sehingga dapat mengontrol dan mencegah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (World Bank, 1996). Oleh sebab itu, implementasi pengembangan *e-Government* akan meningkatkan kemampuan negara dalam mengontrol korupsi sehingga dapat memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi.

Namun pada beberapa negara, pengembangan *e-Government* yang lebih baik tidak dicerminkan oleh penurunan tingkat korupsi. Sebaliknya, korupsi meningkat pada tahun yang sama dengan peningkatan *e-Government* (Transparency International, 2022). Selain itu, pada penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi atas pengaruh *e-Government* terhadap tingkat korupsi suatu negara. Dimana *e-Government* dinilai mampu memperbaiki sistem informasi instansi pemerintah dengan efektifitas transparansi dan akuntabilitas (Castro & Lopes, 2022; Chen & Aklikokou, 2019; Silal et al., 2023). Namun pada beberapa penelitian lain mengatakan bahwa *e-Government* tidak selalu efektif dalam menurunkan korupsi dan sejauh apapun pengembangan *e-Government* tidak akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap korupsi jika *e-Government* tidak memiliki pengaruh terlebih dahulu terhadap penegakan hukum suatu negara yang dapat mengontrol korupsi (Alsaad, 2021; Musa et al., 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa *e-Government* dapat mempengaruhi Persepsi Korupsi apabila telah efektif sebagai *Control of Corruption*.

Berdasarkan penjelasan hubungan antara *e-Government* terhadap Persepsi Korupsi melalui *Control of Corruption* diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat

inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu dan ketidaksesuaian teori dengan fenomena. Dimana untuk dapat memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi, *e-Government* akan lebih efektif jika mampu menjadi salah satu alat kontrol korupsi yang baik sehingga dapat mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi dikemudian hari. Oleh sebab itu, hipotesis keenam yang dapat dirumuskan adalah:

H6 : *Control of Corruption* berperan sebagai *intervening* dalam hubungan antara *e-Government* terhadap Persepsi Korupsi

2.9.7 *Control of Corruption* Berperan Sebagai *Intervening* dalam Pengaruh *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi

Korupsi yang terjadi pada suatu negara dapat disebabkan oleh adanya kesempatan yang muncul dari asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat (Bergman & Lane, 1990). Transparency International (2012) mengatakan bahwa korupsi dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor diantaranya struktur negara, lemahnya regulasi, lemahnya independensi peradilan, serta luasnya kekuasaan diskresi. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa untuk dapat mencegah terjadinya korupsi pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas aspek-aspek tersebut (Pippidi & Dadašov, 2016). Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi administrasi dan penganggaran, peningkatan pelayanan *online*, maupun mendukung pengawasan dari masyarakat digital (*e-Citizenship*), serta independensi peradilan dan media massa yang kemudian terkandung dalam indeks *Public Integrity* (ERCAS & CIPE, 2016). Sehingga *Public Integrity* dapat menjadi salah satu alat yang efektif sebagai kontrol atas korupsi yang dapat mencegah terjadinya korupsi dan memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa ketika regulasi dan hukum anti-korupsi telah ditegakkan dengan baik, maka dapat melindungi kontrol atas perekonomian negara dan mencegah terjadinya korupsi (Monk, 2012). Di sisi lain, Park (2019) mengatakan bahwa pelayanan *online* akan secara efektif mengurangi korupsi, namun akan lebih baik jika negara memiliki sistem hukum yang baik daripada

negara dengan sistem hukum yang buruk sebagai bentuk kontrol atas korupsi. Penelitian lain juga mengatakan bahwa *Public Integrity*, yang merupakan indeks agregat dari berbagai aspek dinilai dapat membantu memberantas korupsi dengan membangun kontrol atas korupsi suatu negara (Pippidi & Dadašov, 2016).

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu diatas, *Public Integrity* dapat memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi ketika *Public Integrity* menjadi sebuah landasan bagi suatu negara dalam menjalankan kebijakan yang dapat mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi dikemudian hari. Oleh sebab itu, hipotesis keenam yang dapat dirumuskan, yaitu:

H7 : *Control of Corruption* berperan sebagai *intervening* dalam hubungan antara *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi

Tabel 10. Hipotesis Penelitian

H1	<i>E-Government</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Control of Corruption</i>
H2	<i>Public Integrity</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Control of Corruption</i>
H3	<i>Control of Corruption</i> memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi
H4	<i>E-Government</i> memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi
H5	<i>Public Integrity</i> memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Korupsi
H6	<i>Control of Corruption</i> berperan sebagai <i>intervening</i> dalam hubungan antara <i>e-Government</i> terhadap Persepsi Korupsi
H7	<i>Control of Corruption</i> berperan sebagai <i>intervening</i> dalam hubungan antara <i>Public Integrity</i> terhadap Persepsi Korupsi

BAB III

Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari *website* terkait dengan mengumpulkan data berupa indeks berskala dari indikator yang terkait dengan periode pengamatan tahun 2016 – 2022. Hal tersebut disebabkan oleh *Index of Public Integrity* yang masih tergolong baru terbentuk sejak tahun 2016 serta mengambil data terkini yaitu tahun 2022. Berikut sumber yang digunakan dalam memperoleh data penelitian:

Tabel 11. Sumber Data Penelitian

No.	Jenis Data	Website
1.	<i>e-Government Development</i>	https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
2.	<i>Index of Public Integrity</i>	https://corruptionrisk.org/ipi-ranking/
3.	<i>Control of Corruption</i>	https://info.worldbank.org/governance/wgi/
4.	<i>Corruption Perceptions Index</i>	https://www.transparency.org/en/

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil negara-negara G20 yang terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa sebagai populasi penelitian karena urgensi permasalahan korupsi sebagai salah satu topik utama yang direncanakan untuk mengembangkan implementasi kebijakan antikorupsi oleh forum ACWG G20. Selain itu, banyaknya penelitian yang meneliti seluruh negara atau membandingkan antara negara maju dan berkembang. Namun penelitian dengan sampel negara-negara G20 masih sangat terbatas, padahal memiliki urgensi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan

periode pengamatan sesuai dengan tahun yang survey yang dimiliki masing-masing *index*. Dimana beberapa *index* melakukan publikasi hasil survey selama 2 (dua) tahun sekali sehingga periode pengamatan yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah pada tahun 2016, 2018, 2020, dan 2022. Sedangkan pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan mengeliminasi negara yang tidak terdapat pada pengukuran *index*, sehingga didapatkan sampel sebanyak:

Tabel 12. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Merupakan Negara dalam G20	43
Tidak terdaftar dalam <i>Index of Public Integrity</i> : Arab Saudi China Siprus Jepang	(4)
Total Negara	39
Periode Penelitian (2016; 2018; 2020; 2022)	4
Total Sampel	156

Sumber: Data diolah, 2023

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini menganalisis pengaruh efektifitas *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi dengan *Control of Corruption* sebagai variabel intervening. Oleh sebab itu, variabel pada penelitian ini antara lain adalah:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dari penelitian ini adalah Persepsi Korupsi dari *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang merupakan indeks yang menunjukkan tingkat anggapan mengenai keberadaan korupsi diantara pejabat publik dan politisi suatu negara. CPI dengan skala 0-100 menunjukkan semakin rendahnya nilai CPI maka mengindikasikan semakin buruknya persepsi masyarakat terhadap korupsi

sehingga mengindikasikan tingkat korupsi yang tinggi, begitu pula sebaliknya (Transparency International, 2022).

CPI = *Corruption Perceptions Index*

b. Variabel Independen

1. *E-Government (EG)*

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya atau variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini menggunakan *e-Government* yang diukur dengan *Development Index* dengan skala 0-1 dimana semakin mendekati angka 1, maka mengindikasikan bahwa semakin efektifnya *e-Government* yang diterapkan oleh negara tersebut, begitu pula sebaliknya (United Nations, 2003).

e-Gov = *e-Government Development Index*

Tabel 13. Range Level *E-Government*

<i>Range</i>	<i>Level</i>
0,00 – 0,249	Rendah
0,25 – 0,499	Sedang
0,50 – 0,749	Tinggi
0,75 – 1	Sangat Tinggi

Sumber: UNDESA, 2022

2. *Public Integrity (IPI)*

Publib Integrity yang dinilai dari *Index of Public Integrity* yang memberikan pengukuran tingkat dan kualitas aksesibilitas publik terhadap pengendalian korupsi dengan memastikan bahwa sumber daya publik dihabiskan tanpa praktik korupsi. IPI terdiri dari enam komponen (*Judicial Independece. Administrative Transparency, Online Services, Budget Transparency, e-Citizenship, dan Freedom of the Press*) yang merefleksikan keseimbangan pengukuran yang dapat berkontribusi pada kontrol korupsi. Skala yang diberikan indeks ini adalah 0-10

yang mengindikasikan bahwa semakin mendekati angka 10, maka mengindikasikan semakin baik integritas publiknya (Pippidi & Dadašov, 2016).

IPI = *Index of Public Integrity*

c. Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel penghubung yang mempengaruhi hubungan antar variabel dependen maupun independen secara teoritis sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini menggunakan indeks *Control of Corruption* dengan skala nilai -2,5 s.d. 2,5 oleh *World Bank* melalui *Worldwide Governance Indicators*. Dimana semakin mendekati angka 2,5 maka mengindikasikan kontrol korupsi yang baik (World Bank, 1996).

CC = *Control of Corruption*

Tabel 14. Variabel Penelitian

Variabel	Ukuran Variabel	Sumber Data	Skala
<i>E-Government</i> (X1)	<i>e-Government Development Index</i>	<i>UN e-Government Knowledgebase by UNDP</i>	0 – 1
<i>Public Integrity</i> (X2)	<i>Index of Public Integrity</i>	<i>Corruption Risk Forecast by ERCAS</i>	0 – 10
<i>Control of Corruption</i> (Y)	<i>Control of Corruption</i>	<i>Worldwide Governance Index by Worldbank</i>	-2,5 – 2,5
Persepsi Korupsi (Z)	<i>Corruption Perceptions Index</i>	<i>Transparency International</i>	0 – 100

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model data panel yang menggabungkan data *cross section* dari 39 negara dalam G20 dan *time series* dari 4 tahun, yaitu 2016, 2018, 2020, dan 2022. Menurut Winarno (2015), *Eviews* lebih tepat digunakan untuk menganalisis data panel karena kemampuannya dalam mengolah data berdasarkan dimensi waktu dan antar sampel dibandingkan dengan SPSS yang tidak relevan dalam pengujian *time series*. Selain itu, dengan menggunakan *Eviews* dapat menguji pemilihan model penelitian yang tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Mode* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Sedangkan

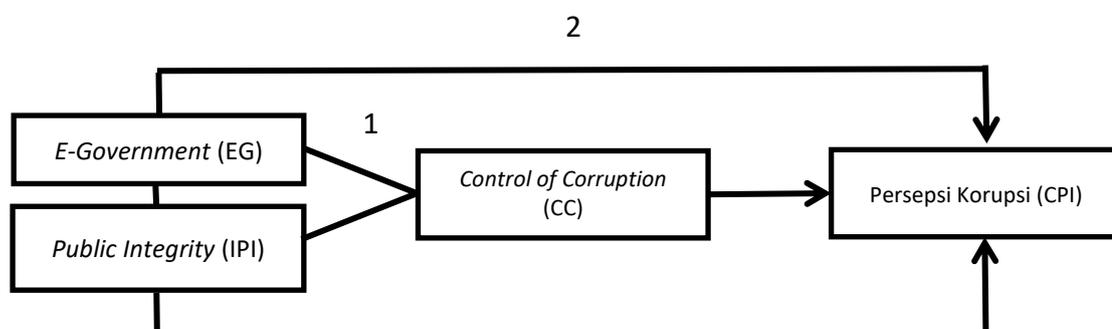
pada aplikasi SPSS hanya menggunakan satu model, yaitu *Common Effect Model* (CEM) atau *Ordinary Least Square* (OLS). Oleh sebab itu, pada penelitian ini menggunakan *Eviews* versi 12 sebagai alat analisis.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini mengadopsi analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan deskripsi data dari variabel penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Sugiyono, 2013). Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian. Maksimum dan minimum digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata sampel (Ghozali, 2016)

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

(Winarno, 2009) mendefinisikan data panel sebagai kombinasi atas data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section* (silang) yang digunakan dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh *degree of freedom* yang lebih besar dan mengatasi masalah dalam kemungkinan penghilangan variabel (*omitted variable*). Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan variabel bebas atau independen (*e-Government* dan *Public Integrity*) yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependen (Persepsi Korupsi) melalui variabel antara atau intervening (*Control of Corruption*) sehingga menciptakan model penelitian sebagai berikut:



Pada pengujian penelitian ini menggunakan alat ukur berupa aplikasi *Eviews* versi 9 yang secara umum digunakan dalam mengolah data panel Ghozali (2016). Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka persamaan model yang dapat disusun antara lain sebagai berikut:

1. $CC = \alpha + \beta EGOV + \beta IPI + e$
2. $CPI = \alpha + \beta CC + \beta EGOV + \beta IPI + e$

Untuk mengestimasi model atas pengujian data panel pada penelitian ini dapat menggunakan tiga pendekatan yang secara umum ditawarkan, yaitu:

1. Common Effect Model (CEM)

Estimasi ini menggunakan asumsi bahwa koefisien tetap antar individu dan waktu yang paling sederhana dengan kombinasi data runtut waktu dan silang tanpa mempertimbangkan perbedaan antara keduanya. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model CEM menggunakan metode *Panel Least Square*, pengujian asumsi klasik disarankan pada beberapa pengujian seperti uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas (Ghozali, 2016).

2. Fixed Effect Model (FEM)

Dalam model ini menggunakan asumsi bahwa perbedaan yang terjadi antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Estimasi model ini terhadap data panel dapat menggunakan variabel dummy untuk memperoleh perbedaan intersepnya antar sampel (Ghozali, 2016). Sama seperti CEM, sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model FEM menggunakan metode *Panel Least Square*, pengujian asumsi klasik disarankan pada beberapa pengujian seperti uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas (Ismanto & Pebruary, 2021).

3. Random Effect Model (REM)

REM memberikan estimasi atas data panel dengan variabel gangguan yang mungkin memiliki hubungan antar individu dan waktu. Kelebihan dari model ini adalah akan menghilangkan heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Apabila hasil pengujian menunjukkan model REM adalah yang paling tepat, maka uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas (Ismanto & Pebruary, 2021).

Guna memperoleh model yang paling sesuai dan tepat untuk digunakan dalam mengolah data panel, maka dapat melakukan pengujian diantaranya:

1. Uji *Chow*

Chow Test merupakan bentuk pengujian dalam menentukan pilihan yang tepat antara model *Random Effect* atau *Fixed Effect* untuk menghasilkan estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah:

H_0 = Menggunakan *Common Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F > 0,05$

H_1 = Menggunakan *Fixed Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$

Apabila hasil menunjukkan CEM adalah yang diterima sebagai model, maka pengujian model dilanjutkan pada tahap *Langrange Multiplier* dan tidak perlu melakukan pengujian *Hausman Test* (Ismanto & Pebruary, 2021).

2. Uji *Hausman*

Hausman Test merupakan pengujian yang dilakukan dalam menentukan pilihan yang tepat antara model FEM atau REM untuk menghasilkan estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 = Menggunakan *Random Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F > 0,05$

H_1 = Menggunakan *Fixed Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$

Apabila hasil pengujian menunjukkan model terbaik adalah REM, sedangkan dalam uji chow hasilnya adalah FEM, maka memberikan arti bahwa REM lah yang terbaik antara CEM dan FEM sehingga tidak perlu untuk melanjutkan ke pengujian *Langrange Multiplier* (Ismanto & Pebruary, 2021).

3. Uji *Langrange Multiplier*

Pengujian ini dilakukan dalam memberikan pilihan yang tepat antara model CEM dengan REM. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H_0 = Menggunakan *Common Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F > 0,05$

H_1 = Menggunakan *Random Effect Model* apabila *P-value cross-section* $F < 0,05$

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai kualitas atas model yang diujikan pada suatu penelitian. Namun, penelitian menggunakan data panel dinilai memiliki kompleksitas yang dapat menghasilkan *degrees of freedom* yang lebih besar pada model penelitian dengan metode *Generalized Least Square* (GLS) sehingga tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 2012). Namun, Basuki & Prawoto (2016) mengatakan bahwa model penelitian menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) disarankan untuk tetap menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri atas beberapa pengujian, yaitu:

1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna menilai apakah suatu model regresi penelitian terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varians yang terdapat pada model penelitian adalah sama, maka dapat dikatakan bahwa terjadi homokedastisitas pada model tersebut dan apabila berbeda, maka disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2017). Penelitian ini menggunakan Uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dengan kriteria pengujian adalah:

- a. Apabila nilai sig. $\leq 0,05$, maka terdapat heterokedastisitas;
- b. Apabila nilai sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat heterokedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah antar variabel independent terdapat korelasi. Suatu model dikatakan memiliki multikolinearitas apabila terdapat korelasi yang tinggi yang akan menyulitkan dalam memisahkan efek variabel independent terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi dari variabel bebas dalam Eviews. Apabila angka menunjukkan besaran $< 0,9$ maka dapat dikatakan model terbebas dari multikolinearitas, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2017).

3.4.4 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- a. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

2. Uji Sobel

Pada penelitian ini menggunakan *Eviews* dalam pengujian hipotesis. Namun, *Eviews* memiliki keterbatasan dalam meneliti model intervening. Sehingga pada penelitian ini menggunakan Uji Sobel untuk menguji peran *Control of Corruption* sebagai variabel intervening menggunakan *software Microsoft Excel* (Ghozali, 2017). Dimana variabel intervening dapat mempengaruhi variabel bebas dan terikat antara dua model pengujian. Rumus uji sobel dapat dijelaskan pada:

$$t(x) = \frac{(\beta a)(\beta b)}{\sqrt{(\beta b^2 SE a^2) + (\beta a^2 SE b^2)}}$$

Keterangan:

$t(x)$: t-Hitung dari Variabel Independen

β : Koefisien uji hipotesis

a : Model pertama (variabel independen terhadap variabel intervening)

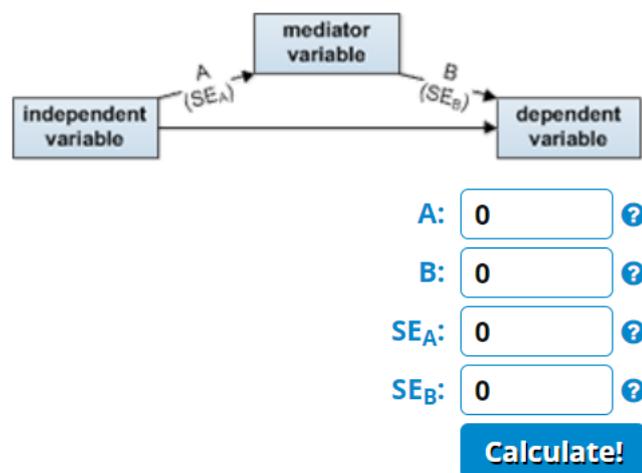
b : Model kedua (variabel intervening terhadap variabel dependen)

SE : Standar Error

Kemudian t-Hitung dari rumus diatas dibandingkan dengan t-Tabel. Apabila nilai t-Hitung menunjukkan nilai yang lebih besar dari t-Tabel ($t\text{-Hitung} > t\text{-Tabel}$),

maka variabel *Control of Corruption* efektif sebagai intervening, dan sebaliknya. Apabila $t\text{-Hitung} < t\text{-Tabel}$, maka *Control of Corruption* tidak efektif sebagai variabel intervening.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat keberagaman cara dalam melakukan pengujian terhadap penelitian dengan intervening/mediasi, baik menggunakan rumus manual seperti diatas atau menggunakan sistem. Oleh sebab itu, guna memperkuat hasil pengujian intervening pada penelitian ini, maka dilakukan uji sobel dengan menggunakan *Interactive Mediation Test Online* dari Daniel Soper (www.danielsoper.com) sebagaimana yang telah digunakan oleh beberapa penelitian terdahulu (Adnan & Kiswanto, 2017; Budiyono & Maryam, 2017; R. Fityan & Wahyudin, 2017). Dalam kalkulator *online* tersebut, Daniel juga menggunakan rumus Sobel untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediator adalah signifikan.



Gambar 6. *Interactive Mediation Test Online* oleh Daniel Soper

Keterangan:

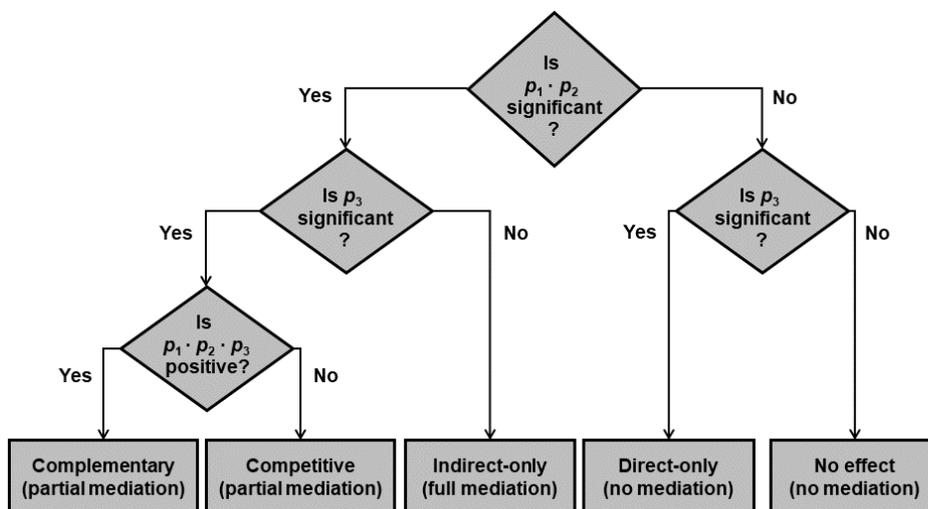
- A : Koefisien (β) dari X_1 (EGOV) atau X_2 (IPI) ke *Control of Corruption*
- B : Koefisien (β) dari *Control of Corruption* ke Persepsi Korupsi
- SE_A : *Standard Error* dari X_1 (EGOV) atau X_2 (IPI) ke *Control of Corruption*
- SE_B : *Standard Error* dari *Control of Corruption* ke Persepsi Korupsi

Pada pengujian Sobel ini mengukur dengan menginput nilai koefisien dan *Standard Error* dari pengaruh variabel independen terhadap mediator dan mediator terhadap dependen, sebagaimana rumus pada uji sobel. Sehingga didapatkan nilai:

- Sobel Test Statistic* yang menunjukkan nilai t-Hitung atas variabel independen
- One-Tailed Probability* yang menunjukkan hasil pengujian perbandingan lebih besar/kecil suatu hipotesis
- Two-Tailed Probability* yang menunjukkan hasil pengujian dua arah atas suatu hipotesis

Berdasarkan hipotesis penelitian yang menguji dua arah yaitu signifikansi atau tidak, maka penelitian ini menggunakan hasil pengujian *Two-Tailed Probability*. Apabila nilai *Two-Tailed Probability* dibawah 0,05 maka dapat dikatakan bahwa *Control of Corruption* berperan sebagai variabel intervening dalam pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi, begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi jenis intervening atau mediasi dari *Control of Corruption* apakah sepenuhnya (*full mediation*); parsial (*partial mediation*); atau tidak memediasi (*no mediation*), maka dilakukan prosedur analisis, yaitu (Hair et al., 2017):



Gambar 7. Prosedur Analisis Intervening

Keterangan:

$P_1.P_2$: Hasil pengujian pengaruh tidak langsung (Uji Sobel)

P_3 : Hasil pengujian pengaruh tidak langsung (model kedua)

Apabila hasil Uji Sobel atau uji pengaruh tidak langsung menunjukkan hasil yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa *Control of Corruption* berperan sebagai intervening, namun sebaliknya, apabila tidak signifikan maka dapat dikatakan bahwa *Control of Corruption* tidak berperan sebagai intervening (*no mediation*).

Kemudian, apabila pengujian tidak langsung menunjukkan nilai yang signifikan, maka perlu dianalisis mengenai pengaruh langsungnya, yaitu pengaruh *E-Government* dan/atau *Public Integrity* terhadap Persepsi Korupsi. Apabila pengaruh langsung adalah signifikan dan positif, maka *Control of Corruption* dikatakan sebagai *Complementary Partial Mediation/Intervening*. Sedangkan jika negatif, maka *Control of Corruption* dikatakan sebagai *Competitive Partial Mediation/Intervening*. Namun, apabila hasil uji pengaruh langsung adalah tidak signifikan, maka mengindikasikan *Control of Corruption* sebagai *Full Mediation/Intervening (Indirect-Only)*. Artinya, *E-Government* dan *Public Integrity* hanya dapat mempengaruhi Persepsi Korupsi jika dapat mempengaruhi *Control of Corruption* terlebih dahulu.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan *Adjusted R²* yang lebih baik dalam merepresentasikan tingkat hubungan yang dimiliki antara variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2016).

BAB V **Kesimpulan dan Saran**

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang disajikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *e-Government* dan *Public Integrity* terhadap *Control of Corruption* pada model pertama, dan pengaruh *e-Government*, *Public Integrity*, dan *Control of Corruption* terhadap Persepsi Korupsi pada model kedua di negara G20 selama tahun 2016 – 2022, maka kesimpulan yang dapat disusun pada penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menekan tingkat korupsi, ACWG G20 perlu berfokus pada integritas publik dengan menyusun dan menegaskan penetapan regulasi dan penegakkan hukum yang berlaku pada negara terkait, baik dari sisi transparansi administrasi dan sistem penganggaran, hingga penegasan regulasi independensi peradilan yang mampu memberikan perlindungan hukum untuk dapat melindungi pelapor dan media massa dalam menyampaikan informasi dan aspirasi terkait sistem peradilan kasus korupsi. Selain itu, perlunya pengembangan penggunaan internet guna memperluas transparansi dan menciptakan masyarakat digital yang demokratis.
2. Sedangkan *e-Government* hanya merupakan salah satu aspek dari upaya yang lebih luas dalam pemberantasan korupsi karena indikator tersebut tidak mampu memberikan pengaruh langsung terhadap perbaikan persepsi bahwa negara bersih dari korupsi. Namun demikian, *e-Government* tetap mampu menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dan tetap dikembangkan oleh negara G20 untuk dapat mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi yang pada akhirnya dapat memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi.

3. Untuk dapat mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi, negara perlu mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki suatu negara dengan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Sehingga kebijakan dan regulasi yang diterapkan mampu secara efektif mengontrol tindakan aparat publik untuk mencegah terjadinya korupsi dan memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi. Hal tersebut disebabkan oleh sebaik apapun sistem yang diterapkan, tidak akan dapat efektif mengontrol dan mencegah terjadinya korupsi apabila individu memiliki pengetahuan dan kontrol diri yang kurang sebagai bentuk preventif untuk tidak melakukan tindak korupsi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya dengan topik terkait. Pertama, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap kontrol atas korupsi yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selain itu, beragamnya lembaga-lembaga anti-korupsi di dunia dan masing-masing negara menghasilkan keragaman indeks penilaian terhadap korupsi suatu negara. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan *Corruption Perception Index* dalam menilai korupsi negara dan *Control of Corruption* sebagai variabel intervening. Terakhir, pada penelitian ini berfokus pada negara yang termasuk dalam G20. Namun, beberapa negara harus dieliminasi karena keterbatasan data yang dapat diperoleh. Dimana negara-negara yang tereliminasi merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negara, seperti Jepang, Arab Saudi, dan China.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang disebutkan sebelumnya, maka beberapa saran dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti faktor-faktor lain yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap korupsi seperti Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, dalam menilai korupsi dapat menggunakan laporan jumlah korupsi faktual di masing-masing negara dibandingkan menggunakan ukuran persepsi. Dengan begitu, penelitian selanjutnya dapat menciptakan model penelitian yang mampu secara efektif menurunkan tingkat korupsi. Terakhir, dengan mengganti indeks pengukuran yang lain atau mengubah variabel dapat meningkatkan jumlah sampel penelitian agar menghasilkan analisis yang lebih tepat sasaran tanpa mengeliminasi negara dengan pengaruh besar terhadap perekonomian dunia.

5.4. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan, dalam konteks ini adalah ACWG yang terdiri dari negara-negara dalam G20 yang berkomitmen dalam peningkatan anti-korupsi, dimana ACWG dapat fokus pada peningkatan ketegasan regulasi dan hukum yang didukung oleh ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku terkait pengembangan *e-Government* dan integritas publik yang akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, partisipasi publik, serta independensi peradilan dan media massa sehingga mampu mengontrol maupun mencegah korupsi dan memperbaiki persepsi bahwa negara bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). *Survai Fraud Indonesia*.
- Adnan, J., & Kiswanto, K. (2017). Determinant of Auditor Ability to Detect Fraud with Professional Scepticism as A Mediator Variable. *Accounting Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/aaj.v6i3.18415>
- Albrecht, C., Kranacher, M., & Albrecht, S. (2011). *Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention*.
- Alsaad, A. (2021). *E-government and corruption control : the mediating effect of law enforcement E-government and corruption control : the mediating effect of law enforcement Abdallah Alsaad*. September.
- ASPANA, & UNDESA. (2001). *Benchmarking e-Government*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Kemenkumham Siapkan Rp 115 Miliar untuk Laksanakan Prioritas Nasional 2023. *BPHN*. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023013110093439/kemenkumham-siapkan-rp-115-miliar-untuk-laksanakan-prioritas-nasional-2023>
- Bandiera, O., Prat, A., Valletti, T., Bandiera, O., & Prat, A. (2008). *Evidence from a Policy Experiment Spending : Evidence from a Policy Experiment*. 6(4).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Rajawali Pers.
- Bergman, M., & Lane, J. (1990). *Public Policy in a Principal-Agent Framework*. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- Bisogno, M., & Cuadrado-ballesteros, B. (2021). Budget transparency and governance quality : a cross-country analysis cross-country analysis. *Public Management Review*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916064>
- BPKP. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *Pengantar Auditing*.
- Brunetti, A., & Weder, B. (2003). *A Free Press is Bad News for Corruption*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(01\)00186-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727(01)00186-4)
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2017). Accountability and Transparency to Fight against Corruption : An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>

- Budiyono, & Maryam, D. (2017). *Does Learning Interest Mediate Computer Self-Efficacy and Internet Use on Learning Achievement? (Accounting Class Student Overview)*. 2017(2), 21–33.
- Bwalya, K. J., & Zulu, S. F. C. (2012). *Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks*. IGI Global.
- Castro, C., & Lopes, I. C. (2022). E-Government as a Tool in Controlling Corruption E-Government as a Tool in Controlling Corruption. *International Journal of Public Administration*.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2076695>
- Chen, L., & Aklikokou, A. K. (2019). Relating e-government development to government effectiveness and control of corruption : a cluster analysis. *Journal of Chinese Governance*, 0(0), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1698693>
- Cimpoeru, M., & Cimpoeru, V. (2015). Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption Control and Economic Performance. *Procedia Economics and Finance*. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01036-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01036-9)
- Clark, A. K. (2017). *Measuring Corruption: Transparency International’s “Corruption Perceptions Index.”*
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*.
- Cressey, D. R. (1950). *The Criminal Violation Of Financial Trust*.
- Damania, R., Fredriksson, P. G., & Mani, M. (2004). The persistence of corruption and regulatory compliance failures: Theory and evidence. *Public Choice*, 121(3–4), 363–390. <https://doi.org/10.1007/s11127-004-1684-0>
- Dirienzo, C. E., Das, J., Cort, K. T., & Burbridge, J. (2007). *Corruption and the role of information*.
<https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jibs.8400262>
- Dwivedi, Y. K., Weerakkody, V., & Williams, M. D. (2009). Guest editorial : From implementation to adoption : Challenges to successful E-Government diffusion. *Government Information Quarterly*, 26(1), 3–4.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.09.001>
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government , Internet Adoption , and Corruption : An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114–126.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- ERCAS, & CIPE. (2016). *Index of Public Integrity*.
<https://corruptionrisk.org/integrity/>

- ERCAS, & CIPE. (2022). *Ranking of Index of Public Integrity*.
<https://corruptionrisk.org/ipi-ranking/>
- G20 Indonesia. (2022). *ACWG G20 Pertegas Komitmen Kerja Sama Pemberantasan Korupsi*. <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/6023/acwg-g20-pertegas-komitmen-kerja-sama-pemberantasan-korupsi?lang=1>
- Gautam, A., Gautam, I., & Jain, S. (2017). *E GOVERNANCE : A POTENT TOOL FOR EFFECTIVE GOVERNANCE E GOVERNANCE : A POTENT TOOL FOR EFFECTIVE GOVERNANCE*. February.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Kuantit*. www.imamghozali.com
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gloppen, S. (2014). *Courts, Corruption and Judicial Independence*.
- HackCorruption. (2023). *Digital Citizenship to Constraint Corruption*.
- Hair, Christian, & Marko. (2017). *The range of EGDI group values for each level are mathematically defined as follows*. SAGE.
- Hamada, B. I. (2019). *Press freedom and corruption : An examination of the relationship*. <https://doi.org/10.1177/1742766519871676>
- Hartz-karp, J. (2012). *Laying the Groundwork for Participatory Budgeting – Developing a Deliberative Community and Collaborative Governance : Greater Geraldton , Western Australia Laying the Groundwork for Participatory Budgeting – Developing a*. 8(2).
- Hosmer, L. (1995). *Trust the Connection Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics*. Academy of Management Review.
- ICW. (2023). *Indonesia Corruption Watch*. <https://www.antikorupsi.org/>
- Inawati, W., & Sabila, F. (2021). Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System , Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 731–745. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16>
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Aptikom.
- International Budget Partnership. (1998). *Open Budget Survey*. <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/>
- International Telecommunication Union. (2005). *Global ICT Data*. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>
- Internet World Stats. (2005). *Facebook Users In The World*. <https://internetworldstats.com/facebook.htm>

- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *Methodology and Analytical Issues*.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *G20 dan Pemberantasan Korupsi*. https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Lustrilanang, P., Suwarno, Darussalam, Rizki, L. T., Omar, N., & Said, J. (2023). *The Role of Control of Corruption and Quality of Governance in ASEAN : Evidence from DOLS and FMOLS Test*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154060>
- Mäkinen, M. (2006). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens' Participation. *E-Learning and Digital Media*. <https://doi.org/10.2304/elea.2006.3.3.381>
- Maolani, D. Y., Kusmayadi, D. A., Hermawan, D., & Maida, A. W. S. (2021). Sulitkah Korupsi Diberantas: Motif Afiliasi Dan Kekuasaan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3)*, 96–105. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.20>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Andi.
- Maria, E., & Halim, A. (2017). *E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan*.
- Monk. (2012). Reform of Regulatory Enforcement and Inspections in OECD Countries. *OECD Publishing*.
- Montes, G. C., & Luna, P. H. (2020). Fiscal transparency , legal system and perception of the control on corruption : empirical evidence from panel data. In *Empirical Economics*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01849-9>
- Musa, N., Othman, R. M., Hanani, D., Ibrahim, A., & Din, I. (2012). *E-Government Services : The Formal , Technical and Informal components of E- Fraud Prevention for Government Agency. 2(2)*, 213–219.
- OECD. (2020). *Public Integrity*. <https://oecd-public-integrity-indicators.org/>
- Oktavia, R., Dewi, F. G., & Fathia, S. N. (2022). *The Global Study : Tackle Corruption through Good Government Governance. 6(5)*, 4391–4402.

- Park, C. H. (2019). *E-government as an anti-corruption tool : panel data analysis across countries*. <https://doi.org/10.1177/0020852318822055>
- Pippidi, A., & Dadašov, R. (2016). Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity. *European Journal on Criminal Policy and Research*, July.
- R. Fityan, Y., & Wahyudin, A. (2017). Keaktifan Ssebagai Intervening dalam Pengaruh Perhatian, Kesiapan, Kemampuan Kognitif terhadap Hasil Belajar. *Economic Education Analysis Journal*, 7(3), 1083–1099.
- Reporters Without Border. (2009). *Reporters Without Border's Press Freedom Index*. <https://rsf.org/en>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Accounting Information Systems*. Pearson.
- Seifert, J., Carlitz, R., & Mondo, E. (2014). *The Open Budget Index (OBI) as a Comparative Statistical Tool*.
- Setyawan, W., Gamayuni, R. R., & Ahmad, S. M. (2019). *Analysis the Effect of E-Budgeting and Government Internal Control System on the Quality of Financial Reporting of Local Government in Indonesia in Islamic Perspectives*. 4(2), 137–150.
- Setyobudi, C. R., & Setyaningrum, D. (2019). E-government and corruption perception index: a cross-country study. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Silal, P., Jha, A., & Saha, D. (2023). Examining the role of E-government in controlling corruption : A longitudinal study. *Information & Management*, 60(1), 103735. <https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103735>
- Sintomer, Y., Herzberg, C., & Röcke, A. (2008). *Participatory Budgeting in Europe : Potentials and Challenges*. 32, 164–178. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x>
- Soekrisno, A. (2013). *Auditing Petunjuk Praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Soonhee, K., & Jooho, L. (2012). *E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government*. xx. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x>.E-Participation
- Suardi, I. (2021). *E-Government, Governance and Corruption in ASIAN Countries*. <https://doi.org/10.33555/embm.v8i2.180>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Taewoo, N. (2018). *Examining the anti-corruption effect of e-government and the*

moderating effect of national culture: A cross-country study.

- Transparency International. (2012). *Causes of corruption in Indonesia 1 Corruption in Indonesia. August 2012.*
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index.*
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/are>
- UNDESA. (2022). *E-Government Survey 2022 E-GOVERNMENT SURVEY 2022.*
[https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web version E-Government 2022.pdf](https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf)
- United Nations. (2003). *UN e-Government Knowledgebase.*
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>
- United Nations. (2015). *Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption.*
- UNODC. (2017). *Corruption, Human Rights, and Judicial Independence.*
<https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2018/04/corruption--human-rights--and-judicial-independence.html>
- Vadlamannati, K., & Cooray, A. (2016). Transparency pays? Evaluating the effects of the freedom of information laws on perceived government corruption. *The Journal of Development Studies.*
- Vousinas, G. . (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime.*
- Warren, M., Vaisu, L., & Mackay, D. (2003). *Defining Fraud: Issues for organizations from an information systems perspective.*
- Welch, A. (2020). Studies in Higher Education Of Worms and woodpeckers : governance & corruption in East and Southeast Asian higher education. *Studies in Higher Education, 0(0)*, 1–9.
<https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1823643>
- Winarno. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistik.* UPP STIM YKPN.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.* UPP STIM YKPN.
- World Bank. (1996). *Worldwide Governance Indicators.*
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Bank. (2001). *e-Government.*
- World Bank. (2015). *Doing Business Data.*
<https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment>
- World Bank. (2017). Why is there an increased focus on fraud worldwide? What are the most common types of fraud in the public sector? *Centre for Financial Reporting Reform.*

- World Economic Forum. (2015). *Global Competitiveness Dataset*.
<https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015/>
- Yuliant, F., Setyawan, W., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. (2020). *E-planning, e-budgeting, and government internal control system as a corruption prevention tools in Indonesia*. Routledge.
- Yuliyana, I., & Setyaningrum, D. (2016). *Pengaruh Penerapan E - Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian / Lembaga*.
- Zamzam, M. (2016). *Searching for Digital Citizenship : Fighting Corruption in Banten , Indonesia Searching for Digital Citizenship : Fighting Corruption in*.
- Zhang, S. (2016). Fiscal Decentralization , Budgetary Transparency , and Local Government Size in China. *Emerging Markets Finance and Trade*.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1142213>